

**ANALISIS KEKALAHAN MAHFUDOH-KOESWIYANTO PADA
PEMILIHAN BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Ulul Muthoharoh

(E04213112)

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN ~~TULISAN~~

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ulul Muthoharoh

Nim : E04213112

Program studi : Filsafat Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Saya yang menyatakan



Ulul Muthoharoh

E04213112

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Penelitian skripsi ini disusun oleh :

Nama : Ulul Muthoharoh

Nim : E04213112

Judul : ANALISIS KEKALAHAN MAHFUDOH-KOESWIYANTO PADA
PEMILIHAN BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2018

Ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing.

Surabaya, 25 Februari 2020

Pembimbing,



Dr. Anek Nurhayati, M. Si

Nip 196909071994032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Ulul Muthoharoh** ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Maret 2020

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dr. H. Kunzawi, M.Si

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Amiek Nurhayati, M. Si

NIP. 196909071994032001

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, S. Th.I, M.Si

NIP. 19820210200901100

Penguji I,

Zaky Ismail M.S.I

NIP. 198212302011011007

Penguji II,

Dr. Khoirul Yahya, S. Ag, M. Si

NIP. 197202062007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulul Muthoharoh
NIM : E04213112
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Dan Filsafat / Filsafat Politik Islam
E-mail address : Ululpurnomo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS KEKALAHAN MAHFUDOH-KOESWIYANTO PADA PEMILIHAN BUPATI
BOJONEGORO TAHUN 2018**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2022

Penulis

()
Ulul Muthoharoh

ABSTRAK

Ulul Muthoharoh, 2020. Analisis Kekalahan Mahfudoh-Koeswiyanto pada Pemilihan Bupati Bojonegoro Tahun 2018. Skripsi Program Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyebab kekalahan pasangan Mahfudhoh – Koeswiyanto dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro 2018, pasangan MK (Mahfudhoh-Koeswiyanto) harus kalah dan mengakui keunggulan pasangan Anna Muawanah. Sehingga kegagalan pasangan Mahfudhoh – Koeswiyanto yang sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari mantan bupati Suyoto, menarik sekali untuk dikaji, sebab disini menunjukkan bagaimana masyarakat ternyata mampu menyikapi dan memiliki sebuah pilihan dan sikap tersendiri terkait dengan pemilihan tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihadapi berupa pernyataan verbal. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab kekalahan pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab kekalahan Machfudhoh dalam Pilkada Bupati Bojonegoro terdiri dari penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal terdiri dari, pertama kurang kuatnya figur Machfudhoh sebagai seorang pemimpin. Kedua, faktor partai pendukung, basis kekuatan pengaruh partai terhadap konstituen pemilihnya di Bojonegoro tetap lebih kuat PKB dan PDIP dibandingkan gabungan partai pendukung Mahfudhoh yakni Nasdem, PAN dan Hanura. Ketiga, faktor lemahnya modal ekonomi. Sementara faktor internal antara lain, dikarenakan pertama stigma masyarakat yang buruk mengenai dinasti politik itu sendiri. Penyebab kedua adalah faktor ormas pendukung agama, dimana pecahnya suara Muhammadiyah sebagai basis pendukung Machfudhoh dikarenakan sebagian warga Muhammadiyah memiliki pola pikir yang konservatif dan tidak menghendaki adanya pemimpin perempuan.

Keyword : Pilbub Bojonegoro, Mahfudhoh – Koeswiyanto, Analisis Kekalahan

DAFTAR ISI

Daftar Isi	xii
BAB I.....	1
Latar Belakang.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Kajian Pustaka.....	13
1. Teori Kepemimpinan.....	14
2. Teori Dinasti Politik	
H. Kerangka Teori	15
I. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	15
2. Fokus Penelitian	16
3. Penentuan Lokasi Penelitian.....	17
4. Informan Penelitian.....	17
5. Sumber Data dan Jenis Data.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Teknik Analisis Data	21
8. Pengujian Keabsahan Data.....	24
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27

KAJIAN TEORI	27
A. Teori Dinasti Politik.....	
B. Teori Kekuasaan.....	36
C. Teori Modal.....	38
D. Teori Kepemimpinan.....	41
BAB III	47
PENYAJIAN DATA.....	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	47
1. Sekilas Sejarah Pemerintahan.....	
2. Geografis dan Demografis Bojonegoro	49
3. Potensi Wilayah Kabupaten Bojonegoro	50
4. Posisi Ketokohan dalam Kultur Masyarakat Bojonegoro	54
B. Daftar Pemilih Tetap dan Dukungan Partai	58
C. Konstelasi Pemilu Bupati Bojonegoro Tahun 2018.....	60
1. Pra Pilbub 2018	60
2. Hasil Akhir Pemilu Bojonegoro 2018	64
D. Profil Mahfudhoh – Koeswiyanto	65
1. Identitas Diri	65
2. Potensi dan Pengalaman.....	67
3. Strategi Pemenangan Pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto	70
4. Identifikasi Modal Mahfudhoh – Koeswiyanto	79
BAB IV	86
Analisis Kekalahan Mahfudoh pada Pemilihan Bupati Bojonegoro	
Tahun 2018	86
4.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kekalahan Kandidat Bupati Mahfudhoh – Koeswiyanto Dalam Pilbup Bojonegoro 2018	86

A. Faktor Internal.....	86
1. Kurang kuatnya figur Mahfudhoh	86
2. Partai Pendukung	89
BAB V	108
KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
SUMBER LAINNYA :	112

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

Latar Belakang

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi konsensus politik nasional, dan merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Indonesia sendiri telah melaksanakan Pemilukada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pemilukada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal¹.

Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diselenggarakanlah pemilukada secara langsung. Pemilukada langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 juni 2005 di Kutai Kertanegara. Pada tahun 2005 telah berlangsung Pemilukada di 207

¹ Bakti Saputra, Jurnal: Kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar dalam Pemilihan Kepala Derah Kota Bandar Lampung 2015, (Universitas Lampung: FISIP, 2016), hal 2

Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi. Tahun 2007 berlangsung Pemilukada di 35 Kabupaten/Kota dan 6 Provinsi. Tahun 2008 dilaksanakan 160 Pemilukada di 13 Provinsi, 147 Kabupaten/Kota².

Selanjutnya terjadi perubahan aturan atas pemilukada melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya terjadi pergantian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, terjadi pergantian melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang³.

Pada tanggal 27 juni 2018, rakyat Indonesia kembali mengadakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang diikuti oleh 171 daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada di 2018. Beberapa Provinsi

² Ibid hal 4

³ Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) <http://www.perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerahpilkada/>, diakses tanggal 13 Maret 2020

di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dalam penelitian ini, mengambil studi kasus analisis Pemilu Pilkada Bojonegoro.

Dalam pertarungan Pilkada Bojonegoro ini, ada empat kandidat. Pasangan Mahfudhoh-Kuswiyanto menggunakan partai politik PAN dengan 6 kursi, Nasdem 2 kursi dan Hanura 2 kursi, jumlah 11 kursi. Sedangkan Pasangan Anna Mu'awanah-Budi Irawanto diusung oleh PKB yang memiliki 6 kursi dan PDI Perjuangan 5 kursi, dengan jumlah 11 kursi. Pasangan Soehadi Moeljono-Mitro'atin diusung Partai Demokrat 7 kursi dan Partai Golkar 7 kursi dengan total dukungan 14 kursi. Sedangkan, Pasangan Basuki-Pudji Dewanto diusung oleh koalisi Partai Gerindra 5 kursi dan PPP 5 kursi dengan jumlah 10 kursi. Dari keempat kandidat, Pasangan Mahfudhoh-Kuswiyanto paling disorot.

Sebab, Mahfudhoh adalah istri dari Bupati Sunyoto yang telah memimpin Bojonegoro selama 2 periode. Namun setelah 2 tahun kepemimpinan ini, Sunyoto tidak bisa lagi menjadi Bupati Bojonegoro, sehingga kemudian istrinya yakni Mahfudhoh yang kemudian menggantikannya. Bagaimanapun dinasti politik adalah sesuatu yang sangat jamak di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, hubungan kekerabatan banyak yang memanfaatkan fasilitas petahana. Calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan inkumben biasanya mendompleng popularitas untuk memenangkan Pilkada. Sementara perhatian publik sangat kurang terhadap hal seperti ini. Fenomena ini akan terus terjadi selama perhitungan pilkada hanya berkutat di persoalan pragmatis saat mengusung pasangan calon. Seperti yang terjadi pada Pilkada Bojonegoro 2018. Nama Mahfudhoh bukan asing bagi masyarakat

Bojonegoro. Dia adalah istri dari Bupati Suyoto itu akhirnya terjun ke politik setelah diyakinkan oleh suaminya yang juga merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Kondisi kekosongan tokoh dalam partai politik membuat Mahfudhoh akhirnya harus maju menjadi kandidat dari PAN. Awalnya PAN dalam pemilihan Cabup ini sudah mengusung nama Kuswiyanto, namun masalah muncul sebab sudah dua kali calon wakil yang diajukan oleh PAN memilih untuk mengundurkan diri. Hal tersebut kemudian mendorong PAN untuk mencari alternatif lain, sehingga kemudian muncul nama Mahfudhoh dan Koeswiyanto.

Fenomena dan kondisi politik dalam Pemilukada yang tidak dapat dihindari adalah adu strategi kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Setiap paslon tentunya memiliki strategi tersendiri guna meraih simpati dukungan kepada para pemilih. Kemampuan berstrategi langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati di arena kampanye, sebab jika menggunakan strategi yang salah tentunya hasil yang diperoleh akan fatal, khususnya kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Maka dari itu para kandidat juga harus memiliki kemampuan membaca perilaku pemilih di suatu daerah tertentu agar bisa memenangkan suara di suatu daerah yang menjadi sasaran lokasi kemenangan.

Dalam sebuah kondisi demokrasi yang ideal, seyogyanya masyarakat bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk terlibat di proses politik. Ini berarti peluang sangat terbuka bagi ruang partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut memperebutkan kue jabatan politik baik dari tingkat nasional hingga regional

sepanjang sejalan dengan peraturan undang-undangan yang ada. Namun, faktanya masyarakat sering terhalang oleh statusnya atau hak sosialnya sebagai konsekuensi dari fenomena politik dinasti.

Menariknya. Dengan dukungan tokoh kuat Bojonegoro, yakni mantan Bupati Suyoto, yang memiliki kekuatan massa yang kuat serta memiliki jejaring politik luas, kemudian dari aspek pemerintahan biasanya *incumbent* juga memiliki pengaruh sangat kuat dalam mempengaruhi staf-staf dibawahnya untuk guna mendukung dalam pemilihan pilbub. Namun disayangkan kenyataannya, pasangan MK (Mahfudhoh-Koeswiyanto) harus kalah dan mengakui keunggulan pasangan Anna Muawanah. Bahkan dalam *real count* dari data masuk wilayah Bojonegoro sebanyak 80 ribu suara, pasangan Moelyoantine (Moeljono-Mitro'atin) mendapat 21,77% (17,483 suara), pasangan MK (Mafudhoh-Kuswiyanto) mendapat 22,23% (17,951 suara), pasangan Nawa (Anna Mu'awanah-Budi Irawanto) 30,75% (24,699 suara) dan pasangan Basudewa (Basuki-Pudji Dewanto) mendapatkan 25,13% (20,182 suara)⁴. Fenomena kekalahan Paslon MK ini sangat menarik, sebab pasangan ini mendapatkan dukungan luar biasa dari mantan Bupati Suyoto sebab Mahfudhoh adalah istri dari Bupati Suyoto, selain itu baru kali ini terjadi Paslon kalah di wilayah di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tempat ia melakukan pencoblosan⁵.

Dari sini menunjukkan bahwa perilaku politik seseorang bisa berbeda-beda, karakteristik politik dan partisipasi politik pemilih merupakan suatu hal

⁴ <https://www.lintasbojonegoro.com/kang-yoto-akui-kekalahan-mk-di-pilkada-2018/> akses pada 22 Oktober 2018

⁵ <http://netpitu.com/baca/27/06/2018/hanya-cabup-mafudoh-suyoto-yang-kalah-di-tps-sendiri/> akses pada 22 Oktober 2018

yang tidak dapat terpisah. Sikap politik pemilih adalah unsur penting guna mencapai keberhasilan pelaksanaan suatu pilbup. Seorang calon secara ideal harus mampu memenuhi standar yang diharapkan oleh pemilih, artinya suara akan menentukan pilihannya berdasarkan dari seberapa besar kemampuan paslon memberikan kontribusi dan partisipasi terhadap seorang pemilih atau suatu kelompok pemilih.

Sikap memilih dalam pilbup adalah bentuk dari respon psikologis dan emosional yang diterapkan dalam bentuk sikap politik dengan cara memberikan suara pada partai politik atau calon dengan cara mencoblos surat suara. Memberikan suara kepada kontestan calon merupakan suatu bentuk kepercayaan yang membawa aspirasi pribadi para pemilih di daerah tersebut

Suara yang diberikan oleh pemilih, juga melihat karena adanya kesesuaian pandangan dan nilai yang dimiliki oleh pemilih dengan kandidat tersebut. Disini nilai adalah suatu preferensi yang dimiliki sebuah organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada, jika calon dapat meraih kepercayaan dalam rangka tujuan. Dipilihnya seorang calon pemimpin secara ideal harus mencapai standar pemilih, ini berarti pemilih akan menentukan siapa calonnya didasarkan atas seberapa besar kontribusi dan partisipasi kandidat terhadap pemilih atau kelompok pemilih.

Maka berdasarkan pemaparan diatas tentang kegagalan pasangan Mahfudhoh – Koeswiyanto yang sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari mantan bupati Suyoto, menarik sekali untuk dikaji, sebab disini menunjukkan bagaimana masyarakat ternyata mampu menyikapi dan memiliki sebuah pilihan dan sikap

tersendiri terkait dengan pemilihan tersebut. Sehingga inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan masyarakat Bojonegoro terhadap Pemilukada 2018 terhadap pasangan Mahfudhoh Koeswiyanto dengan judul : **Analisis Kekalahan Mahfudoh-Koeswiyanto pada Pemilihan Bupati Bojonegoro Tahun 2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka ada persoalan penting yang perlu dilakukan analisis lebih dalam, terutama berkaitan dengan situasi dan kondisi tentang kekalahan Mahfudhoh – Koeswiyanto dalam Pemilukada Bojonegoro 2018, berikut perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana analisis faktor kekalahan Mahfudhoh-Koeswiyanto di Pemilukada Bojonegoro 2018?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam kekalahan Paslon Mahfudhoh-Koeswiyanto pada Pemilukada 2018.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka gambaran penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terutama:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik, penelitian diharapkan mampu menjadi acuan bagi para akademisi, khususnya mahasiswa, peneliti, dosen, politisi sampai dengan masyarakat pada umumnya sebagai khazanah keilmuan khususnya berkaitan dengan bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap pasangan calon dari aspek kepemimpinannya, kedepannya penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam rangka memahami kekuatan kepemimpinan dalam pemilu.

2. Manfaat Praktis

Kepemimpinan adalah suatu modal kekuatan tersendiri untuk memenangkan pemilu saat kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di Indonesia.

E. Definisi Konseptual

Definisi operasional adalah menyamakan suatu konsep yang abstrak ke dalam aspek sesuai dengan realistik sehingga fenomena tersebut dapat dikenali. Guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan jelas dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, sebagai berikut : “Analisis Kekalahan Mahfudoh-Koeswiyanto pada Pemilihan Bupati Bojonegoro Tahun 2018.” maka akan dipaparkan istilah teoritis yang digunakan di dalamnya, sebagai berikut :

1. Teori Kepemimpinan
2. Kekalahan dinasti politik

F. Penelitian yang Relevan

Berikut adalah penyajian penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Bakti Saputra (2015)

Penelitian ini berjudul “Kekalahan Tobroni-Komarunizar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2015”, penelitian melakukan analisis berkaitan kekalahan paslon Tobroni Harun-Komarunizar pada pilkada Bandar Lampung 2015. Hal ini diprediksikan tidak terjadi karena latar belakang pasangan ini memiliki pengalaman diberbagai bidang. Namun nyatanya belum mampu membawa pasangan ini memenangkan pilkada Kota Bandar Lampung dengan perolehan suara yang hanya menembus angka 11,34%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung. Indikator dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Psikologis, dan Pendekatan Rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa perilaku pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis merupakan faktor kekalahan yang dilihat dari penilaian usia, agama, pekerjaan, dan etnis. Perilaku pemilih di Bandar Lampung ternyata tidak dipengaruhi oleh faktor sosiologis. Sedangkan pada pendekatan psikologis, Tobroni Harun-Komarunizar belum

mampu dianggap sebagai figur yang ditokohkan oleh pemilih di Bandar Lampung.. Pendekatan rasional dari perilaku pemilih melalui penilaian orientasi kandidat, isu dan pencitraan menunjukkan bahwa informasi mengenai visi misi dan sosok Tobroni harun informasinya tidak sampai ke masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilih di Kota Bandar Lampung merupakan pemilih rasional sehingga kekalahan Tobroni sepenuhnya karena pemilih sudah sangat rasional. Faktor lain yang ditemukan peneliti adalah dikarenakan konflik internal Partai Amanat Nasional dalam memperkuat dukungan Tobroni Harun. Selain itu tim sukses kurang melaksanakan tugasnya dengan maksimal di akibatkan karena kurangnya logistik yang diberikan Tobroni Harun-Komarunizar.

2. Reza Muhammad (2015)

Penelitian ini berjudul “Kekalahan Petahana Dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Luwu Utara”, penelitian ini adalah analisis tentang Majunya Arifin Junaidi didalam Pilkada 2015 di Kabupaten Luwu Utara, sebagai seorang petahana yang memiliki modal kuat. Seperti dukungan partai besar, figur, dan kinerja. Namun dengan modal yang kuat, petahana dikalahkan oleh kandidat penantang yang merupakan wakil petahana sendiri yang diusung partai menengah dan belum teruji kinerja sebagai seorang pemimpin.

Penelitian ini menggunakan dasar penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai

informan yang dianggap memahami terkait kinerja kepemimpinan petahana di Kabupaten Luwu Utara selama menjadi petahana. Serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, koran, internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekalahan petahana dalam pilkada, akibat kepuasan masyarakat yang rendah terhadap kinerja kepemimpinan Arifin Junaidi. Program Kerja serta pelayanan dasar publik di bawah kepemimpinan Arifin Junaidi menjadi penyebab kekalahan petahana. Disisi lain kinerja Indah Putri selaku wakil petahana dinilai lebih baik. Dalam menyelesaikan konflik dan interaksi sosial yang lebih baik dengan seringnya mengikuti forum yang diadakan oleh masyarakat. Sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat yang berujung pada kekalahan petahana. Masyarakat lebih memilih Indah Putri yang merupakan wakil petahana, di dalam pilkada di Kabupaten Luwu Utara di bandingkan dengan Arifin Junaidi.

3. Agus Sutisna (2017)

Penelitian selanjutnya berjudul “Gejala Proliferasi Dinasti Politik Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah”, Ratu Atut Chosiyah pada jabatan gubernur selama hampir dua periode (2006-2011 dan 2011-2014). Pasca keberhasilannya menduduki jabatan gubernur, secara hipotetik Ratu Atut berhasil membangun dan mengembangkan dinasti politiknya ke berbagai arena kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada obyek tatakelola dan praktik

kekuasaan pemerintahan gubernur di Provinsi Banten, dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik atau politik kekerabatan di Provinsi Banten pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah mengalami proliferasi (persebaran, pertumbuhan) di berbagai arena kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, triangulasi, studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik atau politik kekerabatan pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Banten memperlihatkan adanya gejala persebaran (proliferasi, pertumbuhan), bukan saja pada ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyebar di banyak arena kehidupan masyarakat, seperti pada arena kehidupan bisnis, sosial-budaya, pendidikan, dan keormasan.

Keberhasilan Ratu Atut dalam mengkonsolidasikan dan memperluas jejaring kuasa dinastinya didukung oleh berbagai strategi politik yang dilakukannya terutama sejak ia menjabat gubernur. Beberapa strategi itu antara lain merawat loyalitas para pendukungnya melalui berbagai bentuk pemberian fasilitas bantuan hibah, proyek dll; melakukan kontrol penuh terhadap birokrasi melalui proses rekrutmen dan mutasi para pejabat di lingkungan Pemprov Banten; menguasai asosiasi-asosiasi bisnis, organisasi-organisasi sosial dan pendidikan, organisasi olahraga dan kepemudaan; mengkooptasi elemen-elemen

masyarakat sipil lainnya seperti partai politik, ormas, asosiasi pendidikan, LSM, pers, kampus, pesantren, dll dengan memberikan kucuran dana (hibah APBD maupun dana pribadi) untuk kegiatan dan operasional pimpinan/pengurus dan organisasinya, termasuk membiayai perjalanan ibadah haji dan umroh para ulama dan tokoh masyarakat Banten; dan membeli suara para pemilih pada setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada melalui timses dan jejaring yang dibangunnya di seluruh kabupaten dan kota di Banten.

G. Kajian Pustaka

1. Kampanye Politik

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan.

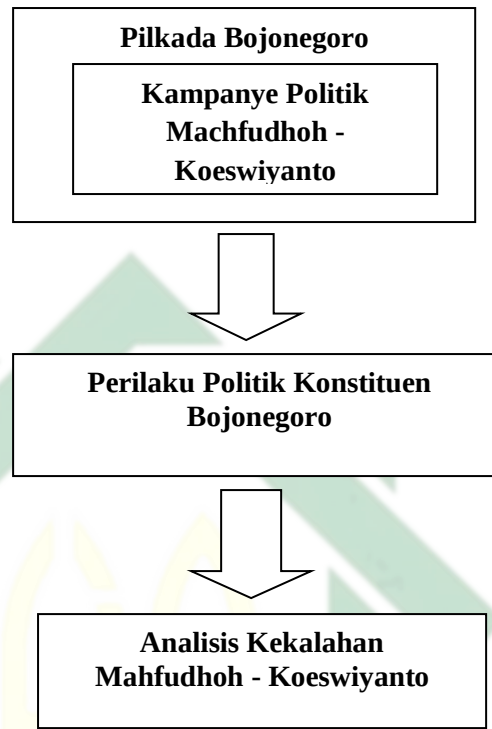
2. Teori Perilaku Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2010)⁶ bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu⁷. Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

⁶ Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

⁷ Putra, Fadillah. (2003). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

H. Kerangka Teori



I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyebab kekalahan pasangan Mahfudhoh – Koeswiyanto dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro 2018. Maka penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihadapi berupa pernyataan verbal, dan sikap pemaknaan bukan numerik atau angka-angka.⁸ Oleh karena data dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah maka penelitian ini juga sering disebut sebagai

⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996), 94

metode naturalistik.⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Nana Syaodih bahwa penelitian kualitatif memiliki dua tujuan. Oleh karenanya, penelitian ini juga memiliki dua tujuan yaitu (1) menggambarkan dan mengungkap dan (2) menggambarkan dan menjelaskan. Dengan kata lain bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan kekalahan Mahfudhoh dan Koeswiyanto.¹⁰

2. Fokus Penelitian

Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan maka perlu ditetapkan terlebih dahulu segala rencana yang akan dikerjakan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan cara dan metodologis yang ada, dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi penelitian kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab kekalahan pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 1

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan lokasi penelitian ini memiliki beberapa alasan yaitu:

Pertama, konstelasi politik yang ada di Kabupaten Bojonegoro cenderung cair. Banyak elemen masyarakat yang turut andil dalam pengambilan kebijakan baik kalangan profesional, kalangan santri dan elit ekonomi, apalagi dalam pertarungan politik dalam Pemilu 2018.

Kedua, calon Mahfudhoh dan Koeswiyanto ini adalah calon yang diusung oleh mantan bupati Suyoto, di Sugihwaras awalnya adalah basis pendukung Sunyoto, namun ternyata pasangan Mahfudhoh – Koeswiyanto justru mengalami kekalahan di kecamatan ini.

Ketiga, desa Sugihwaras adalah daerah asal peneliti. Sehingga sangat etis jika peneliti melakukan penelitiannya di Kabupaten Bojonegoro, Desa Sugihwaras dengan maksud dan tujuan memberikan kontribusi intelektualisme yang berwujud produk penelitian ini. Diharapkan pada penelitian ini bisa memberikan sumbangsih terutama dalam mewujudkan cita-cita luhur menuju daerah yang maju dalam aspek pendidikan politik.

4. Informan Penelitian

Sugiyono menjelaskan bahwa penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal dan tepat sasaran, karena itu informan dalam penelitian ini ditentukan

berdasarkan penguasaan atau pengetahuan terkait dengan data yang ingin digali, kemudian aktivitasnya yang masih berkaitan dengan objek penelitiannya, serta yang dianggap mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai. Untuk itulah peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan pada penelitian ini.¹¹

Pada penelitian informan yang dituju oleh peneliti adalah para tokoh berpengaruh yang memiliki keterkaitan dengan Pemilu 2018, dan memiliki andil besar dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu 2018 di Bojonegoro. Termasuk para elit partai pendukung pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto beserta dengan juru kampanyenya yakni partai PAN, Nasdem, Hanura. Selanjutnya adalah dari kalangan tim sukses, relawan masyarakat yang turut andil memberikan perolehan suara kandidat yang sangat mengetahui bagaimana proses pra dan pasca pemilu. Kemudian orang-orang lain yang memiliki andil sebagai sumber informan yang mendukung lengkapnya data penelitian ini.

5. Sumber Data dan Jenis Data

Data merupakan salah satu komponen utama dalam proses pelaksanaan penelitian. Karena pembacaan dan analisis penulis didapatkan dari data yang telah diperoleh. *Lofland* menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata* dan *tindakan*, selebihnya

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 221

adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹² Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian.¹³ Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari informan penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya, seperti observasi ke lapangan, wawancara, dan yang lainnya. Sedangkan para informannya sudah ditentukan dan dipilih oleh peneliti dengan menggunakan skala prioritas. Adapun data yang ingin dikumpulkan dari informan penelitian ini adalah terkait dengan beberapa hal yaitu: 1) strategi pemenangan kandidat petahana pada Pemilu Bupati 2015, 2) peran aktor dan dramatisasi beserta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemenangan kandidat petahana.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer.¹⁴ Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi baik yang didapat dari lapangan maupun dari tempat atau sumber lain.

¹² Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 157

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

¹⁴ *Ibid.*, 129

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan *dokumentasi*.

a. Wawancara

Interview atau wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian. Dalam proses wawancara, subyek penelitian atau informan harus jelas, dengan mengetahui bagaimana latar belakang informan tersebut.¹⁵ Pencarian informasi dengan cara wawancara kepada aktor yang banyak tahu dan ditentukan sebelumnya dalam upaya pencarian data yang valid. Dalam penelitian ini yang menjadi objek interview adalah orang-orang atau masyarakat yang dianggap mengerti dan memahami kondisi politik paslon Mahfudhoh- Koeswiyanto. Begitu juga mereka yang tahu betul berbagai hal yang terjadi selama pemilihan dimaksud.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.¹⁶ Wawancara model ini lebih

¹⁵ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 157-158

memberikan kebebasan bagi seorang peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Dasar pertimbangan menggunakan metode *in depth interview* dalam pengumpulan data adalah untuk memperoleh konstruksi atau kejelasan tentang upaya yang dilakukan kandidat Mahfudhoh-Koeswiyanto.

Sedangkan instrumen yang digunakan adalah pertanyaan pertanyaan yang memang sudah disusun sebelumnya. Dengan instrumen dimaksud, diharapkan peneliti akan lebih fokus pada permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data-data tertulis lainnya. Penulis perlu mengambil gambar selama proses penelitian berlangsung untuk memberikan bukti secara real bagaimana kondisi di lapangan terkait permasalahan yang ada di masyarakat.¹⁷ Arsip-arsip dan data-data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil interview.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Setelah data terkumpul baik dari data primer maupun sekunder, penulis menganalisis dalam bentuk deskripsi.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 231

Analisis deskripsi merupakan analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran (deskripsi) dari data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Menurut Moleong, analisis data dilakukan kualitatif melalui tiga tahap, yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai apa yang menjadi faktor penyebab kekalahan pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro 2018.

b. *Data Display* (penyajian data)

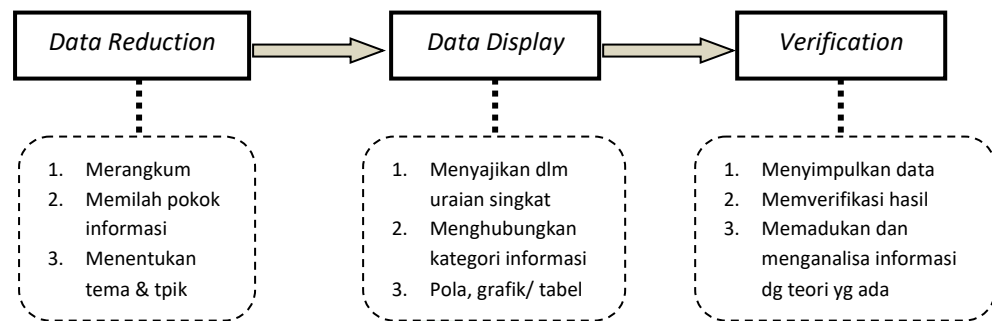
Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat

dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai faktor penyebab kekalahan pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro 2018.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti. Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai faktor penyebab kekalahan pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro 2018 kemudian membuat kesimpulan..¹⁸

¹⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 62

Gambar 1: Skema Teknik Analisis Data

8. Pengujian Keabsahan Data

Moleong berpendapat bahwa: “Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data”. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *Persistent Observation* (observasi berlanjut), *triangulasi*, maupun *Peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi).¹⁹

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Adapun langkah oprasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

¹⁹ *Ibid.*, 173

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Definisi Operasional, Variabel dan Indikator Variabel, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam BAB ini akan membahas mengenai Teori Kampanye Politik, Perilaku Politik dan Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Obyek Penelitian (Populasi, Sampel, dan Teknik Sampel), Sumber Data (Data Primer dan Data Sekunder), Metode Pengumpulan Data (Observasi, Angket, dan Dokumentasi, Hipotesis, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

BAB ini akan membahas mengenai Deskripsi Lokasi Penelitian, Karakteristik Responden, Penyajian Data Penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN

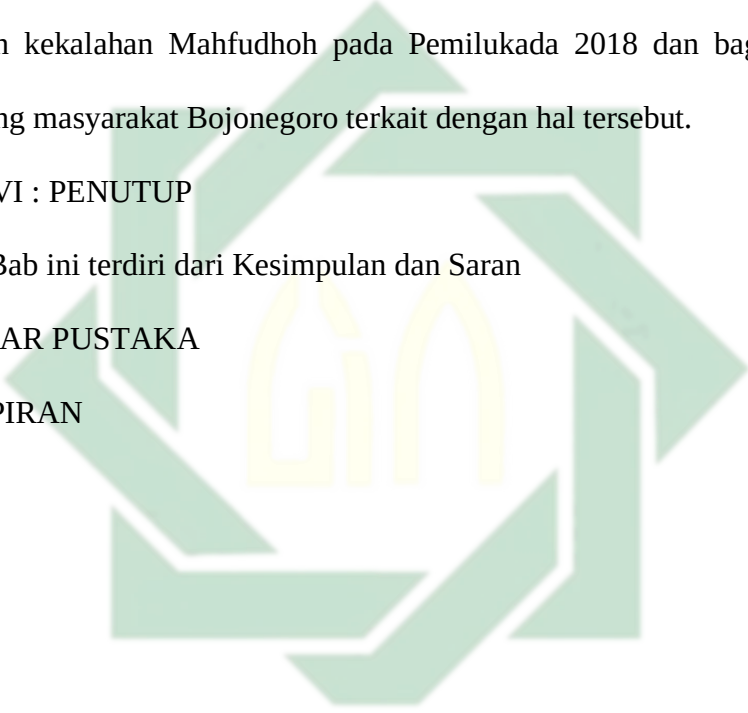
Pada Bab ini nantinya akan menganalisis tentang persepsi masyarakat terkait dengan kekalahan Mahfudhoh pada Pemilu 2018 dan bagaimana sudut pandang masyarakat Bojonegoro terkait dengan hal tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kampanye Politik

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang

paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan.

Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama. Yang nantinya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. adapun jenis jenis kampanye adalah sebagai berikut²⁰ :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:

- a. Debat publik / debat terbuka antar calon
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
- g. Pertemuan Terbatas
- h. Rapat umum
- i. Tatap muka dan dialog

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu²¹ :

²⁰ Venus Antar. Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Simbiosis Rekaatam Media, Bandung, 2004. hlm 20

²¹ Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: Rosda. 2009 Hal 48-49

1) *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya.

2) *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.

3) *Ideologically or cause oriented campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau Social Change Campaigns (Kotler), yakni kampanye yg ditujukan utk menangani masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yg terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencana dan Donor Darah

4) Jenis kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaigns*)

a) Kampanye Negatif

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.

b) Kampanye Hitam

Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan

B. Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan

jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

C. Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme. Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Ramlan Surbakti (2010)²² bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari

²² Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu²³.

Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Perilaku politik atau (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:

- a) Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b) Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c) Ikut serta dalam pesta politik

²³ Putra, Fadillah. (2003). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- d) Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e) Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f) Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku²⁴.

Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga politik tersebut adalah bertanggungjawab atas wewenang proses politik, sedangkan kegiatan politik warga negara biasa adalah partisipasi politik. Jika dikaitkan dengan Pemilu, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan daerahnya.

Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya.

Menurut Munir Mulkan (2009) melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku

²⁴ Budiardjo, Miriam, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandirabadi, 2008, edisi revisi *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 35

politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut²⁵.

Menurut Syafrudin (2011) salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

- a) Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
- b) Terjadi pada situasi tertentu,
- c) Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
- d) Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu²⁶

D. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Mana kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

²⁵ Abdul Munir Mulkhan, 2009. Politik Santri. Kanisius, Yogyakarta

²⁶ Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung:Alfabeta

Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama “semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.” ini adalah prinsipnya²⁷.

Pemilukada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin di daerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara demokratis. Dalam penjelasan Undang- undang No.32 Tahun 2004 pasal 24 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang dimaksud adalah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.

Seseorang yang berminat atau ingin menjadi kepala daerah mencari dukungan dari salah satu atau beberapa basis partai. Gunanya untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat untuk mendaftarkan diri kepada pengurus partai guna dicatat sebagai salah satu bakal calon (Balon) kepala daerah. Sesudah itu, masing-masing harus mencari dukungan yang lebih luas agar mendapat suara mayoritas dalam pemilihan calon. Tentu saja

²⁷ Soehino, 2010, Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia, Yogyakarta:UGM, Hal 43-44

kepala daerah dan wakilnya, bisa memperoleh dukungan lewat berbagai cara seperti bujukan, persetujuan ataupun manipulasi.

Disamping itu, tiap bakal calon juga harus mempersiapkan kertas kerja untuk dipresentasikan dalam sebuah “debat publik” intern partai. yang kenyataannya tidak lebih dari show, karena memang tidak pernah terjadi perdebatan yang sesungguhnya karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Setelah proses tersebut dilalui, ditetapkanlah calon kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD yang prosedurnya relatif sama dengan proses penyaringan bakal calon menjadi calon tetap. Bedanya, ada tahap akhir pemilukada yaitu masing-masing calon harus mengikuti fit and proper test di depan tim atau pleno DPRD.

E. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada Negara yang memungkinkan Negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Michael Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi dimana ada relasi disana ada kekuasaan.

Konsep kekuasaan Michael Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian dan Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam satu hubungan kepemilikan sebagai *property*, perolehan, atau hak

istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah.

Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi antara pembagian kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategis. Strategis itu berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem, atauran, susunan dan regulasi. kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan aturan dan hubungan dari dalam memungkinkan semuanya terjadi kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui pengutamaanya, melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan. Dimana, Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha adil dalam masyarakat. Karena sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi sosial secara umum²⁸.

1. Distribusi kekuasaan

a. Model elite berkuasa

Menurut model elit berkuasa, sumber-sumber daya terpusat diantara sebagian orang. Menurut Gaetano Mosca menyebutkan distribusi kekuasaan politik dalam masyarakat sebagai di semua masyarakat muncul dua kelas rakyat kelas yang berkuasa dan kelas yang di kuasai. Kelas pertama selalu lebih sedikit jumlahnya, menjalankan fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati semua keuntungan yang dibawah oleh kekuasaan, sementara yang kedua jumlahnya lebih banyak yang diarahkan dan di kendalikan

²⁸ Ciaran Cronin, Bourdieu and Foucault on Power and Modernity. Philosophy Social Criticism, 1999. Vol.22:55-85.

oleh yang pertama, melalui suatu cara yang kadang-kadang sedikit banyak bersifat sah, sekadang-kadang sewenang-wenang dan keras.

b. Model pluralis

Model ini kekuasaan didistribusikan kepada banyak orang atau banyak kelompok sosial tidak hanya terfokus pada kalangan elit.

c. Model kekuasaan populer

Kekuasaan menurut kaum populer harus desentralisasikan dan warga Negara kebanyakan harus memainkan perang paling besar dalam pembuatan keputusan, mereka harus mengawasi kaum elite dan para pemimpin kelompok sosial.

F. Teori Modal

Penulis menggunakan teori modal yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu yang menunjukan teori modal itu terdiri atas modal sosial, modal politik, modal ekonomi dan modal simbolik. Di teori modal ini peneliti menggunakannya untuk menganalisis apa yang menjadi faktor penentu keluarga Mahfudhoh berusaha bertahan untuk melanggengkan dinasti politik Suyoto, berusaha tetap bertahan dirana politik Bojonegoro sampai saat ini.

a. Modal Sosial

Menurut Pierre Bourdieu meendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang memiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik

(atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Pierre Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial kapital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. jadi intinya dari modalitas sosial yaitu : (1) adanya kepercayaan dari masyarakat, (2) adanya interaksi sosial dan (3) adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

b. Modal Politik

Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan partai politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan dalam pemilu jadi, modal politik yaitu : (1) kepemilikan jabatan politisi , (2) adanya dukungan dari parpol tertentu dan (3) adanya tim sukses yang solid.

c. Modal Ekonomi

Model ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Di dalam musik kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasarat utama ketika calon itu bukan berasal dari

partai yang dicalonkannya. Jadi modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumber daya dari dana pribadi dan donator, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye untuk pemenangan pemilihan umum. (adanya dukungan dana dan adanya kepemilikan alat produksi atau perusahaan).

d. Modal Simbolik

Menurut Pierre Bourdieu, pada dasarnya modal simbolik (seperti prestise, kehormatan atau karisma) ialah modal lainya ketika diketahui dan diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekuasaan simbolik yang cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruang sosial. Singkatnya, modal simbolik merupakan hasil dari transformasi dari modal ekonomi, sosial dan kultural kedalam bentuk baru, dan hasil transformasi ini memiliki kekuatan besar²⁹.

e. Modal Kultural

Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk

²⁹ Haryanto, Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakar di Sulawesi Selatan). (Yogyakarta Polgom, 2014). h.17.

gelar sarjana). Contoh lain modal kultural adalah kemampuan menulis, cara pembawaan dan cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Dengan demikian modal kultural merupakan representasi kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aspek logika, etika, maupun estetika. Atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai modal yang berdasar pada pengetahuan yang dilegitimasi. Modal kultural pada dasarnya berupa keyakinan akan nilai-nilai (*values*) mengenai segala sesuatu yang dipandang benar dan senantiasa diikuti dengan upaya untuk mengaktualisasikannya. Modal kultural tidak dengan sendirinya teraktualisasikan dalam realita yang bermanfaat bagi orang yang meyakini, dan atau masyarakat pada umumnya. Mirip dengan kemanfaatan modal sosial, modal kultural dapat berhenti sebagaimutiara terpendam yang tidak memberikan manfaat apapun. Kemampuan dan komitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk memelihara, melestarikan, memperbaharui, dan memanfaatkannya.

G. Teori Kepemimpinan

Menurut teori peran (*role theory*), setiap anggota masyarakat menempati posisi tertentu, begitu pula halnya pada lembaga-lembaga dan organisasi. Dalam hal ini Jan Stewart memandang kepemimpinan muncul

sebagai suatu cara berinteraksi yang melibatkan tingkah laku oleh dan untuk individu³⁰.

Kepemimpinan dimasukkan dalam kategori ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip, definisi dan teori-teorinya diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan taraf hidup manusia ada banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan³¹.

Definisi kepemimpinan menurut Tead dalam Kartono menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Terry dalam Kartono berkata kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Menurut Howard Hoyt menyatakan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang³².

Kepemimpinan menurut Young lebih terarah dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan

³⁰ Stewart, Jan 2006, Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined through the Works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood, Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue #54, June 26.

³¹ Kartini Kartono. 2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

³² Ibid.,

akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Kepemimpinan semacam ini bersifat informal dan selalu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok pada saat khusus dan tempat khusus untuk mencapai tujuan tertentu³³.

Sementara itu, berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, O'Donnel memandang kepemimpinan sebagai aktivitas membujuk manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu pemimpin juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi³⁴.

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita kepemimpinan adalah sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard, kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi tingkah laku atau kelompok, upaya untuk mempengaruhi tingkah laku ini bertujuan

³³ Ibid.,

³⁴ Rivai, Veithzal 2007, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT Raja Grafindo Persada.

mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan tujuan organisasi yang mungkin sama atau berbeda³⁵.

Jika memperhatikan beberapa definisi kepemimpinan di atas, terlihat bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen, tetapi bukan semuanya. Sehingga dalam hal ini para manajer harus merencanakan dan mengorganisasikan, tetapi peran utama pemimpin adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik.

Pemimpin yang baik harus dipandang sebagai peran khusus atau proses pemberian pengaruh. Proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas, dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi. Menurut Yukl secara umum seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini³⁶:

1. Ciri (motivasi, kepribadian, nilai)
2. Keyakinan dan optimisme
3. Perilaku
4. Keterampilan dan keahlian
5. Integritas dan etika
6. Taktik pengaruh
7. Sifat pengikut

³⁵ Danang, Sunyoto. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Buku Seru.
http://repository.upi.edu/17628/4/S_MBS_1001311_Bibliography

³⁶ Yukl, Gary. (2005). Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: PT. Indeks.

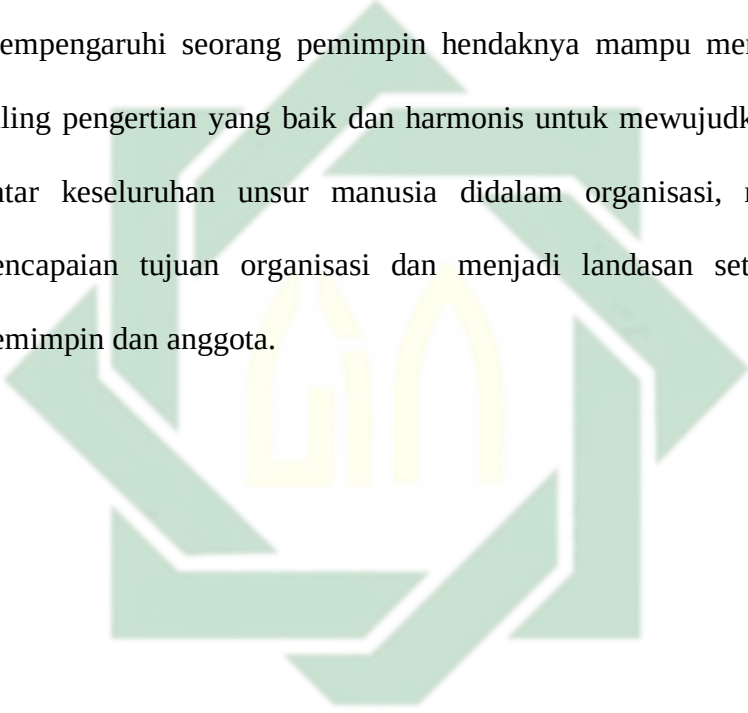
Seorang pemimpin yang baik haruslah mampu mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi. Dasar kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif sesuai dengan perintahnya. Menurut Yukl selain karakteristik seorang pemimpin yang baik harus memiliki pengaruh dan peranan penting dalam melakukan hal berikut ini³⁷ :

1. Memotivasi anggota untuk dapat mencapai tujuan
2. Rasa saling percaya dan bekerjasama antar anggota
3. Pembelajaran dan pembagian pengetahuan baru antar anggota
4. Organisasi aktivitas kerja
5. Pencapaian tujuan dan strategi yang dicapai
6. Pengembangan kepercayaan dan keterampilan antar anggota

Pemimpin mempunyai peran strategis dalam melakukan optimalisasi organisasi. Pemimpin memiliki fungsi vital dalam membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai organisasi. Kekuatan pemimpin untuk mempengaruhi kinerja anggota organisasi mengakibatkan posisinya menjadi sentral dalam pengambilan keputusan, maupun kebijakan yang akan diambil. Pembuatan kebijakan juga memungkinkan seorang pemimpin untuk melakukan evaluasi kinerja beserta solusi dalam setiap problema organisasi.

³⁷ Ibid.,

Seorang pemimpin yang ideal dituntut untuk mampu mengetahui konteks perubahan dan tantangan organisasi. Sehingga dalam diri seorang pemimpin diperlukan kemampuan untuk menangkap gejala sosial budaya yang ada disekitarnya. Dengan demikian perubahan yang seharusnya dilakukan dalam organisasi akan segera dapat dilakukan. Proses mempengaruhi seorang pemimpin hendaknya mampu menciptakan rasa saling pengertian yang baik dan harmonis untuk mewujudkan kerja sama antar keseluruhan unsur manusia didalam organisasi, mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan menjadi landasan setiap hubungan pemimpin dan anggota.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

1. Sekilas Sejarah Pemerintahan

Pada masa kehidupan sejarah di Indonesia kuno dimulai dengan pengaruh yang kuat dari kebudayaan Hindu yang datang dari India sejak abad 1 yang pada saat itu membedakan kehidupan negara Indonesia pada jaman Madya dan jaman yang baru. Pada kala itu kabupaten Bojonegoro masuk kedalam wilayah kekuasaan Majapahit, hingga abad XVI saat kerajaan Majapahit runtuh, kekuasaan berpindah ke Demak Jawa Tengah, dan Bojonegoro menjadi bagian wilayah dari kerajaan Demak. Sehingga sejarah Bojonegoro yang kuno bercorak Hindu dengan berdasarkan temuan-temuan fakta banyak benda peninggalan sejarah pada jaman kuno di wilayah hukum kabupaten Bojonegoro mulai terbentuk. Sejak masa Majapahit slogan yang tertanam di dalam tradisi masyarakat adalah “sepi ing pamrih, rame ing gawe” yang hingga saat ini tetap dimiliki.

Bojonegoro pada saat menjadi wilayah Demak mempunyai loyalitas tinggi kepada raja dan pada kerajaan. Hingga kemudian dengan berkembangnya budaya yang baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan pada akhirnya terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai Hindu berubah ke nilai yang baru Islam tanpa adanya disertai oleh gejolak. Raden Patah, Senopati Jumbun, Adipati Bintaro, diresmikan

sebagai Raja I awal abad XVI dan semenjak itu Bojonegoro menjadi wilayah kedaulatan Demak. Dalam peralihan kekuasaan yang disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah kerajaan Pajang dengan raja Raden Jaka Tingkir Adipati Pajang pada tahun 1568.

Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang, Adiwijaya merasa tidak mampu untuk melawan Senopati yang telah merebut kekuasaan Pajang 1587. Maka Senopati memboyong semua benda pusaka Kraton Pajang ke Mataram. Daerah Mataram yang telah diserahkan Sunan Amangkurat kepada VOC berdasarkan perjanjian, adalah pantai utara Pulau Jawa, sehingga merugikan Mataram. Perjanjian tahun 1677 merupakan kekalahan politik berat bagi Mataram terhadap VOC. Oleh karena itu, status kadipaten pun diubah menjadi kabupaten dengan wedana Bupati I yang berkedudukan di Jipang pada tanggal 20 Oktober 1677. Maka tanggal, bulan dan tahun tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1725 Susuhunan Pakubuwono II naik tahta. Tahun itu juga Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Haria Mentahun I memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dari Padangan ke Desa Rajekwesi. Lokasi Rajekwesi $\pm$ 10 Km di selatan Kota Bojonegoro. Sebagai kenangan pada keberhasilan leluhur yang meninggalkan nama harum bagi Bojonegoro, tidak mengherankan kalau nama Rajekwesi tetap dikenang di dalam hati rakyat Bojonegoro sampai sekarang.

2. Geografis dan Demografis Bojonegoro

Secara Geografis Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi $112^{\circ} 25' - 112^{\circ} 09'$ Bujur Timur dan $60^{\circ} 59' - 70^{\circ} 37'$ Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 230.706 Ha. Kabupaten Bojonegoro bagian dari Propinsi Jawa Timur dengan jarak 110 km dari ibukota propinsi dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Batas-batas administrasi Kabupaten Bojonegoro adalah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tuban

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora Luas wilayah administrasi Kecamatan dan persentase luas wilayah Tabel 2.1 dimana Kecamatan Tambakrejo adalah Kecamatan terluas. Kecamatan Gayam adalah Kecamatan Pemekaran berdasarkan pada Peraturan Daerah No 22 tahun 2011. Yang merupakan pecahan sebagian Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Ngasem. Pada Peta 2.1. menyampaikan Peta wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro dengan wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai RTRW.

Tabel 3.1 Wilayah Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Kec.Margomulyo	139.68	6.05%
2	Kec.Ngraho	71.48	3.10%
3	Kec.Tambakrejo	2019.52	9.08%
4	Kec.Ngambon	48.65	2.11%
5	Kec.Sekar	130.24	5.65%
6	Kec.Bubulan	84.73	3.67%
7	Kec.Gondang	107.10	4.64%
8	Kec.Temayang	124.22	5.40%
9	Kec.Sugihwaras	87.15	3.78%
10	Kec.Kedungadem	145.33	6.29%
11	Kec.Kepoh Baru	79.64	3.45%
12	Kec.Baureno	66.35	2.88%
13	Kec.Kanor	59.78	2.59%
14	Kec.Sumberejo	76.58	3.32%
15	Kec.Balen	60.52	2.62%
16	Kec.Sukosewu	47.48	2.06%
17	Kec.Kapas	46.48	2.01%
18	Kec.Bojonegoro	25.71	1.11%
19	Kec.Trucuk	36.71	1.59%
20	Kec.Dander	118.36	5.13%
21	Kec.Ngasem	197.26	8.55%
22	Kec.Kalitidu	65.26	2.86%
23	Kec.Malo	65.95	2.84%
24	Kec.Purwosari	65.41	2.70%
25	Kec.Padangan	62.32	1.82%
26	Kec.Kasiman	42.00	2.25%
27	Kec.Kadewan	57.80	2.45%
28	Kec. Gayam	50.05	2.17%

Sumber : Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2018

3. Potensi Wilayah Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki ragam budaya seperti tayub, dan saat ini juga batik jonegaran juga telah berkembang menjadi sebuah entitas budaya. Pada sektor ekonomi memiliki potensi dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. Sektor Pertanian, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
2. Sektor industri kreatif;
3. Sektor Migas;
4. Sektor Pariwisata.

Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro berupa lahan pertanian maka saat ini dan masa yang akan datang sektor ini akan menjadi salah satu sektor unggulan yang diunggulkan. Memang sebelum ditemukannya SDA Migas di Kabupaten Bojonegoro, maka sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB. Namun Kabupaten Bojonegoro tidak pernah bergantung dari migas karena sektor pertanian selama ini menjadi sektor basis yang menyerap tenaga kerja paling besar.

Perekonomian daerah Kabupaten Bojonegoro, mengalami pertumbuhan sebesar 5,68% yaitu dengan PDRB tahun 2017 sebesar Rp31,22 triliun dan tercatat Sektor Pertambangan dan Galian (Sektor Prima Migas) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 42,02 %, diikuti sektor-sektor Non Migas seperti Sektor Pertanian sebesar 19,55%; dan Sektor 19 Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) tumbuh sebesar 13,62%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,65%;. Sedangkan pada Sektor Pertanian (Sektor Primer Non Migas) justru mengalami penurunan pertumbuhannya yaitu dari 6,98% Tahun 2013 menjadi 4,52% di Tahun 2017. Penurunan sektor pertanian dan kenaikan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut dikarenakan setelah adanya pertambangan

minyak di Kecamatan Gayam banyak pekerja dari luar Kabupaten Bojonegoro yang masuk dan memilih hotel sebagai tempat tinggal selama mereka berada di Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi peningkatan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Bojonegoro telah berkontribusi secara berturut-turut dari Tahun 2015-2017 adalah sebesar 38%, 44% dan 42%.

Total pendapatan Kabupaten Bojonegoro dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 tercatat dalam Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat pendapatan total Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 891 milyar dan pada tahun 2014 telah mencapai Rp2 triliun. Sehingga selama tahun 2012 sampai dengan 2018 pendapatan Bojonegoro telah meningkat 1 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2015. Rincian pendapatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tabel Pendapatan Daerah Bojonegoro

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Target
2012	882.347.658.449	891.861.575.688	101%
2013	947.009.197.825	928.092.988.284	98%
2014	1.167.862.467.560	1.218.517.787.935	104%
2015	1.375.281.152.951	1.508.114.648.941	110%
2016	1.686.213.152.951	1.861.387.567.943	110%
2017	2.071.170.836.658	2.024.348.269.284	98%
2018	2.472.878.676.126	2.517.682.805.862	101%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Realisasi target yang melebihi 100% seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang terjadi pada Kabupaten Bojonegoro. Hal mendasar yang mempengaruhi progres laju pertumbuhan ekonomi daerah di antaranya adalah peningkatan signifikan pada beberapa sektor produksi. serta dorongan dari terkendalinya tingkat inflasi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro telah mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dilihat dari pendapatan migas tahun 2018 mencapai 5,86%, sementara inflasi relatif tinggi dengan capaian 7,34%. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2018 mengalami peningkatan dari Rp 2,024 triliun menjadi Rp 2,517 triliun. Rinciannya, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mencapai 115,63% dari target Rp 251,875 miliar terealisasi Rp 291,243 miliar. Jumlah tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp 68,677 miliar atau terealisasi 113,32%. retribusi daerah dari target sebesar Rp 29,395 miliar terealisasi sebesar Rp31,925 miliar. Laba perusahaan daerah dari target sebesar Rp 19,121 miliar terealisasi sebesar Rp19,408 miliar, serta lain-lain PAD yang sah dari target sebesar Rp 142,751 terealisasi sebesar Rp 172,231 miliar. Untuk dana perimbangan hanya tercapai Rp 1,761 triliun dengan rincian bagi hasil pajak sebesar Rp 159,658 miliar, bagi hasil bukan pajak sebesar Rp637,023 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 920,522 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 44,549 miliar. Pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 39,60%, yakni dari Rp 332,857 miliar di Tahun 2013 menjadi Rp 464,681 miliar di Tahun 2018.

4. Posisi Ketokohan dalam Kultur Masyarakat Bojonegoro

Secara umum, kultur masyarakat di Bojonegoro adalah kultur agraris. Hal ini pernah dipotret oleh seorang ilmuwan Australia, C.L.M Penders, yang melukiskan sejarah Bojonegoro sebagai sejarah kemiskinan, dalam bukunya *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North West East Java*. Kondisi ini pula yang diidentifikasi oleh tim peneliti sebagai permasalahan yang mengemuka di sebagian wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Sebagaimana sebuah kenyataan yang berlawanan dengan keberlimpahan migas, kondisi masyarakat desa di sekitar area migas di Bojonegoro adalah tipikal masyarakat agraris dengan budaya kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang rendah, ditambah dengan absennya tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat diluar tokoh pemerintahan. Hal tersebut mengemuka ketika tim peneliti Universitas Gadjah Mada berdiskusi dengan beberapa warga Bojonegoro pada bulan Agustus 2013.

Kondisi masyarakat seperti ini dapat berimplikasi pada ketidakefektifan dana investasi di masyarakat (*mismanagement of funds*), serta kemungkinan terjadinya *chaos* ketika kepemimpinan di pemerintahan mengalami krisis. Dari hasil diskusi juga disebutkan, secara umum warga tidak banyak yang memiliki sawah, sehingga aktivitas bertani di sawah hanya dilakukan oleh warga yang memiliki sawah. Tanaman padi tidak begitu menjanjikan secara ekonomis

sebab biaya produksinya begitu mahal. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah yang kering dan mengandalkan sawah tadah hujan. Di sisi lain, banyak warga yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk usaha produktif, misalnya untuk menanam pisang. Jenis pisang yang ditanam pun bervariasi seperti pisang raja, pisang kepok, pisang susu, pisang subliro, dan masih banyak jenis lainnya. Tanaman ini umumnya ditemukan hampir di semua pekarangan milik warga. Kondisi tanah sangat mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman pisang. Sampai saat ini pisang menjadi salah satu produk yang potensial. Potensi pisang dimanfaatkan warga sebagai sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain pisang, ketela pohon juga mudah didapat di wilayah tersebut, meskipun siklus hidup dan potensinya tidak sebaik tanaman pisang. Warga juga menanam jati sebagai bentuk investasi. Tanaman jati dapat dijadikan komoditas atau paling tidak digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembuatan meubel di rumah. Masyarakat juga memelihara berbagai ternak antara lain kambing, ayam, dan sapi. Masyarakat beternak ayam sebagai sumber penghasilan, sedangkan ternak kambing umumnya untuk tabungan.

Di sisi lain, budaya dan kehidupan wirausaha (*entrepreneurship*) tidak berkembang. Dengan kondisi masyarakat seperti ini, ketika menghadapi kehadiran uang dalam jumlah besar dapat dipastikan mereka cenderung konsumtif dan tidak mampu memanfaatkan uang tersebut untuk investasi (dikembangkan). Hal tersebut perlu diantisipasi sebab

masyarakat begitu rentan terhadap dampak buruk inflasi. Di bidang sosial, ketiadaan tokoh yang mempunyai pengaruh kuat di luar tokoh pemerintah juga berdampak pada minimnya kepemimpinan di wilayah tersebut. Kepemimpinan yang ada hanya kepemimpinan formal (Pemerintahan Desa). Selain itu, masyarakat juga minim wawasan serta pengalaman dalam berorganisasi.

Kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi pun rendah. Di tambah pula, minimnya *skill* manajemen yang dimiliki masyarakat menyebabkan mereka tidak siap menghadapi krisis. Situasi ini sangat rentan ketika pemerintah mengalami krisis karena akan melahirkan masyarakat tanpa kepemimpinan (anarki) sehingga mudah terjadi gejolak sosial³⁸.

Dalam kondisi seperti itu, sejak memangku jabatan Bupati Bojonegoro di periode 2007-2012, Suyoto langsung melakukan pembenahan berbagai regulasi dalam pengelolaan DBH migas, sekaligus memberikan iklim investasi yang kondusif bagi investor. Ia pun menginisiasi peraturan daerah (Perda) tentang ruang wilayah migas dan pertanian serta Perda terkait pemberdayaan masyarakat lokal di tahun 2011. Pada Perda tersebut, diatur besaran persentase alokasi dana untuk desa tempat wilayah kerja (WK) migas berada dan untuk desa-desa di sekitarnya.

³⁸ Ada Migas Di Ladang Petani. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada, 2013. Editor: Dr. Widodo, M.Sc, Defirentia One, SIP Danang Wahyuhono, SIP. Diterbitkan sebagai Laporan Awal Studi Pengembangan Wilayah Bojonegoro Berbasis Agro, dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan serta Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Industri Migas.

Saat kembali dipercaya masyarakat Bojonegoro hingga tahun 2017 nanti, Kang Yoto pun meneruskan pembenahan dalam pengelolaan DBH tersebut. Misalnya, ia menginisiasi Perda untuk memperpanjang manfaat DBH bagi masyarakat dengan membentuk dana abadi yang berfungsi untuk mengantisipasi apabila DBH yang diperoleh Bojonegoro tidak lagi cukup untuk membiayai pembangunan atau potensi migas di Bojonegoro sudah habis. Ada dua sumber dana abadi yang dimungkinkan, yakni, 100% keuntungan saham partisipasi (participating interest atau PI) dan DBH yang diperoleh sekitar Rp1,4 triliun per tahun itu. Dengan asumsi pendapatan bunga 6% Bojonegoro akan memperoleh tidak kurang dari Rp 84 miliar per tahun.

Selain itu, saat membuat estimasi pendapatan DBH yang akan dimasukkan dalam APBD ia sangat berhati-hati. Dirinya selalu berupaya menghasilkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang besar, tujuannya sebagai antisipasi bila DBH tidak terealisasi, secara teknis sudah ada dana segar yang menjadi cadangan. Kang Yoto pun menginvestasikan dana ke Bank Jatim dalam jumlah besar, bahkan kini Bojonegoro adalah pemilik saham terbesar keempat di Bank Jatim.

Cerdas mengelola DBH Migas yang dilakukan Kang Yoto untuk Bojonegoro adalah contoh nyata memaksimalkan dana yang didapat untuk memberi manfaat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kekayaan alam yang tidak bisa diproduksi secara instan, migas dikelola langsung oleh pemerintah yang

diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Migas. Pembagian porsi hasil penjualan minyak dan gas bumi itu juga diatur oleh pemerintah pusat³⁹.

B. Daftar Pemilih Tetap dan Dukungan Partai

Jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT yang merupakan data terpadu dan terbaru Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDT) berjumlah total 1.026.229, dengan pemilih laki-laki sebanyak 509.497 dan pemilih perempuan 516.732. jumlah DPT ini tersebar pada 28 desa di Bojonegoro, dan jumlah TPS mencapai 2.408 TPS. Berikut adalah tabelnya :

Tabel 3.3 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kabupaten Bojonegoro 2018

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Balen	119	28.573	26.253	52.090
2	Baureno	141	31.411	31.127	62.538
3	Bojonegoro	149	30.267	32.457	62.724
4	Bubulan	28	5.964	6.251	12.215
5	Dander	140	31.589	32.169	63.758
6	Gayam	58	12.772	12.841	25.613
7	Gondang	52	9.929	9.918	19.847
8	Kalitidu	90	19.090	19.386	38.476
9	Kanor	113	23.873	23.964	47.837
10	Kapas	91	20.736	20.842	41.587
11	Kasiman	66	11.950	12.215	24.165
12	Kadewan	23	4.924	5.183	10.107
13	Kedungadem	145	33.832	34.306	68.138

³⁹<https://biz.kompas.com/read/2015/10/22/085607228/Bojonegoro.Kota.Cerdas.Kelola.Dana.Bagi.Hasil.Migas>. Akses pada 25 September 2019

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
14	Kepuh Baru	123	26.299	26.260	52.599
15	Malo	63	12.225	12.509	24.734
16	Margomulyo	60	8.853	9.154	18.007
17	Ngambon	23	4.688	4.666	9.354
18	Ngasem	105	23.643	23.778	47.421
19	Ngraho	85	18.249	18.350	36.599
20	Padangan	77	16.247	16.454	32.701
21	Purwosari	52	11.737	11.787	26.315
22	Sekar	56	10.561	10.582	21.712
23	Sugihwaras	88	18.373	18.561	36.934
24	Sukosewu	77	16.872	16.853	33.725
25	Sumberrejo	143	27.698	28.343	56.041
26	Tambakrejo	103	21.931	22.317	44.248
27	Temayang	71	14.604	14.686	44.248
28	Trucuk	67	15.044	15.159	29.230
TOTAL		2.408	509.497	516.732	1.026.229

Sumber : KPUD Bojonegoro 2018

Dalam penyelenggaraan Pilbup kali ini KPU Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa pencapaian target partisipasi masyarakat memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2018 cukup tinggi dibandingkan Pilgub Jatim sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan naiknya angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Tahun 2018 di Bojonegoro mencapai 77,9 persen. Target tersebut lebih tinggi dari target KPU RI sebesar 77,5 persen. Menurutnya, capaian angka partisipasi tersebut juga lebih tinggi dari partisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2012.

Pada Pilbup Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 tercatat DPT nya 1.026.229 pemilih, kehadiran pemilih 799.916 atau 77,9

persen, hal ini disebabkan oleh upaya sosialisasi menyeluruh termasuk adanya Gerakan Keluarga Sadar Pemilu dengan cara memaksimalkan dapat menemui pemilik suara saat membagikan undangan memilih pada formulir C6. Selain itu juga karena strategi melibatkan aktif *stakeholder* dan peran netizen dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Kemudian, tak tidak kalah penting lagi, adalah kerja keras calon bupati dan wakil bupati serta peran aktif masyarakat selama tahapan berlangsung juga menjadi faktor penting capaian target partisipasi ini⁴⁰.

Pada Pilbub Bojonegoro 2018 ini Empat pasangan peserta pilkada yang ditetapkan yaitu pasangan Mahfudhoh Suyoto - Kuswiyanto yang diusung PAN, Hanura dan Nasdem, dan pasangan Anna Mu'awanah-Budi Irawanto diusung PKB, PDIP dan PKPI. Selain itu, Soehadi Moelyono-Mitro'atin diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat dan Basuki-Pudji Dewanto yang diusung Partai Gerindra dan PPP.

C. **Konstelasi Pemilu Bupati Bojonegoro Tahun 2018**

1. Pra Pilbub 2018

a. Bakal Calon dan Calon Kandidat Pilbub Bojonegoro

Pada pemilu Bojonegoro 2018, terdapat 4 paslon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro, yaitu: 1. Mahfudhoh Suyoto-Kuswiyanto (MK) dengan kendaraan PAN, Partai Nasdem dan Partai Hanura, 2. Anna Muawannah-Budi Irawanto (Anna-

⁴⁰ <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3202/KPU-Bojonegoro-Sukses-Selenggarakan-Pilkada-Serentak-2018-> akses pada 07 Oktober 2019

Wawan) partai pengusung PKB dan PDIP, 3. Soehadi Moelyono-Mitroatin (Moelyo Atine) diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar, 4. Basuki-Pudji Dewanto (Basudewo) dimajukan oleh PPP dan Partai Gerindra.

Kondisi ini dinilai cukup ketat, sebab para paslon memiliki banyak pendukung kuat di belakang mereka. Konfigurasi kekuatan jika dilihat dari perolehan suara partai pengusung pada pemilu legislatif (Pileg) 2014 cukup seimbang. Golkar dan Demokrat (190.825 – 14 kursi), PDIP dan PKB (163.379 – 11 kursi), PPP dan Gerindra (144.200 – 10 kursi), PAN, Nasdem dan Hanura (191.977 – 10 kursi). Namun, peta tersebut tidak menggambarkan kondisi terkini. Hal ini dikarenakan preferensi pilihan politik rakyat tidak selalu sama dengan partai politik. Banyak faktor berpengaruh, diantaranya; daya tarik individu paslon, kerja politik struktur partai, tim sukses, sentimen emosional pada kandidat/tim sukses dan sebagainya.

b. Ceruk Suara

Perebutan suara dari ceruk sama, serta penggunaan isu sentimen emosional tetap akan terjadi. Misalnya, suara birokrasi dan jejaringnya jadi ceruk strategis. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bojonegoro sekitar 9.500 orang. Jumlah itu belum termasuk kepala desa dan perangkatnya.

Paslon yang konfiden dapat dukungan birokrasi adalah Moelyo Atine. Soehadi Moelyono, dengan pengalaman panjang di birokrasi, berkarir dari bawah hingga menjabat Sekretaris Daerah, punya pengaruh signifikan.

Basudewo tentu akan melakukan hal sama melalui mantan Kepala Dinas Perdagangan Basuki. Sedangkan pasangan Mahfudhoh – Koeswiyanto berharap, jejak 10 tahun kepemimpinan Bupati Suyoto dapat meraih simpati birokrasi melalui Mahfudhoh Suyoto. Pasangan Anna-Wawan diprediksikan sulit dapat suara dari sini, karena keduanya belum pernah menjadi bagian birokrasi di Bojonegoro, namun belum tentu tidak mendapat dukungan PNS.

Ceruk suara lain jadi rebutan adalah basis massa Ormas seperti; Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tiga paslon dipastikan akan berebut suara Kaum Nahdliyin. Anna Muawanah diharapkan menarik suara Nahdliyin karena pernah menjabat pengurus PP Muslimat, dan mantan Ketua Umum PPKB. Basuki, pengurus Tanfidziah PC NU, sehingga berpotensi dapat dukungan Nadhliyin. Disisi lain, sebagian suara dapat berlabuh ke Mitroatin yang dikenal juga sebagai keluarga besar NU. MK sulit mendapatkan limpahan suara. Namun sebaliknya, berpotensi besar memperoleh dukungan solid dari Muhammadiyah yang diperkirakan tidak terpecah seperti suara NU.

Kelompok lain yang berpengaruh adalah pengusaha. Mereka punya kepentingan stabilitas politik lokal dan pergantian penguasa tidak mengganggu bisnis. Dukungan kelompok ini cukup signifikan, terutama mobilisasi dana. Meskipun tanpa “politik uang”, biaya pilkada tetap mahal. Sumbangan pengusaha dapat menutup pendanaan. Pasal 74 UU No. 10 Tahun 2016 mengatur sumbangan dana kampanye. Yaitu, sumbangan perorangan maksimal Rp75 juta, dan badan hukum swasta maksimal Rp750

juta. Namun dalam pelaksanaannya sulit diawasi. Jejak dukungan pengusaha akan terlihat samar-samar. Afiliasi organisasi pengusaha seperti KADIN, HIPMI dan sebagainya memiliki “nature politik” berbeda ormas non pengusaha. Faktor penentu dukungan lebih banyak kedekatan personal Paslon dengan masing-masing pengusaha.

MK seharusnya dapat memprediksikan basis dukungan lebih awal. Khususnya, dari pengusaha yang dapat kemudahan berbisnis selama kepemimpinan Suyoto. Namun calon lain juga punya potensi sama, misalnya: Basuki, dikenal dekat dengan pebisnis. Anna Muawanah, selain anggota DPR RI sekaligus juga pengusaha. Moelyo Atine akan berebut pengaruh dengan MK, mengingat keduanya memiliki “jualan” sama di mata pengusaha.

c. Isu Kampanye yang Diangkat

Isu kampanye diprediksikan tidak jauh berbeda antar Paslon dan bersifat normatif. Misalnya, melanjutkan kemajuan pemerintahan sekarang dan memperbaiki kekurangannya, pengentasan rakyat miskin, pembangunan infrastruktur dan hal normatif lainnya. Isu pembeda mungkin hanya soal dana abadi migas, jika PDIP konsisten dengan penolakannya.

MK dan Moelyo Atine memiliki “produk kampanye” relatif sama karena menjadi bagian pemerintahan Suyoto. Basuki dalam skala lebih kecil juga sama. Artinya, prestasi Pemkab saat ini dapat dikapitalisasi oleh Paslon tersebut. Sebaliknya, karena menjadi bagian masa lalu, maka mudah dikritik. Pendukung Anna-Wawan menyampaikan, hanya Paslon ini yang

bukan bagian dari masa lalu. Klaim itu juga tidak sepenuhnya tepat. Wawan sebagai anggota DPRD berkontribusi juga dalam perumusan kebijakan seperti perumusan Perda, APBD dan pengawasan kinerja eksekutif.

Isu lainnya adalah asli atau pendatang. Dari 4 paslon, yang mengusung isu ini hanya Basudewo. Mungkin “laku” di pemilih emosional, namun tidak berpengaruh pada pemilih rasional. Ditingkat massa, pemilih pragmatis yang preferensi pilihan politiknya dipengaruhi uang juga banyak. Swing voter juga banyak, dapat berubah pada menit akhir. Hal lainnya, tidak semua partai dapat menggerakkan struktur dan kadernya. Terutama yang memiliki perbedaan tajam internal, terjadi pergantian kepemimpinan dan konflik internal.

3. Hasil Akhir Pemilu Bojonegoro 2018

Gambar 3.1 : Hasil Perhitungan Suara Pada Pilkada Bojonegoro 2018



Sumber : KPU Bojonegoro

Hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, yang dilakukan desk Pilkada Pemkab di Kantor Bakesbangpol Linmas, Rabu (27/6/2018) hingga pukul 00.00 wib, pasangan Anna Muawanah - Budi Irawanto (Anna - Wawan), tetap unggul.

Dari 765.050 surat suara dari 28 kecamatan di Bojonegoro, pasangan no 3 yang diusung PKB dan PDI Perjuangan itu memperoleh suara terbanyak dari tiga rivalnya yakni sebanyak 235.128 suara (31%). Disusul pasangan calon no 1, Soehadi Moeljono - Mitroatin sebanyak 194.430 suara (25%). Perolehan suara terbanyak ketiga diraih paslon no 4, Basuki - Pudji Dewanto sebanyak 186.209 suara (24%), dan paslon no 2, Mahfudhoh - Kuswiyanto mendapat 149.283 suara (20%)⁴¹.

D. Profil Mahfudhoh – Koeswiyanto

1. Identitas Diri

Dalam daftar riwayat hidup yang dirilis oleh KPUD Bojonegoro, sebagai bagi dari persyaratan administratif pencalonan. Petahana bernama paslon Mahfudhoh dan Kuswiyanto (MK), dimana Mahfudhoh adalah isteri Bupati Bojonegoro yang saat ini masih menjabat yaitu Suyoto. Sedangkan, Kuswiyanto adalah anggota DPR MPR-RI yang berasal dari Dapil IX (Bojonegoro -Tuban) dan Kuswiyanto adalah Kader Partai Amanat Nasional (PAN).

⁴¹ <https://beritabojonegoro.com/read/14955-kpu-bojonegoro-rilis-perolehan-suara-hitung-cepat-pilkada-serentak-2018.html> akses pada 07 Oktober 2019

Identitas Kandidat Mahfudhoh

Nama Lengkap	Dra. Mahfudhoh
Tempat / Tanggal Lahir	Lumajang, 05 Juni 1965
NIK	3529190105610003
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Arif Rahman Hakim – Polim Regency Blok E-2 Desa Pacul, Kecamatan Kota Bojonegoro
Jenis Kelamin	Perempuan
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	09.627.787.6-608.000
Suami	Sunyoto
Jumlah Anak	3 (tiga)
Ayah	Hj. Nurrohman Albanjari
Jumlah Saudara Kandung	2 (dua)

Identitas Kandidat Kuswiyanto

Nama Lengkap	Hj. Kuswiyanto, SH. MH
Tempat / Tanggal Lahir	Ponorogo 31 Desember 1965
NIK	3529190105610003
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Mangga No. 26 Desa Campurejo Kecamatan Kota Bojonegoro
Jenis Kelamin	Laki-laki
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	09.687.797.6-609.000
Istri	Hj. Dra. Soffiana
Jumlah Anak	2 (dua)
Ayah	Hj. Samad Bahauddin
Jumlah Saudara Kandung	4 (empat)

Sementara itu, Kuswiyanto adalah politisi senior yang terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 yang duduk di Komisi VIII mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IX setelah memperoleh 45.456

suara. Di karir politiknya, pria kelahiran Ponorogo itu pernah menjabat Sekretaris DPW PAN Jatim 2010-2015 sekaligus anggota DPRD Jatim dua periode yaitu 2004-2014.

2. Potensi dan Pengalaman

Dari aspek pengalaman, pasangan Mahfudhoh dan Kuswiyanto, ini, adalah sosok yang cukup dikenal dikalangan masyarakat Bojonegoro. Mahfudhoh lebih dikenal sebagai istri dari Bupati Sunyoto yang menjabat sebagai bupati dua periode di Bojonegoro. Mahfudhoh maju menggunakan partai PAN, Nasdem dan Hanura, bahkan pada saat pendaftaran ratusan kader dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dan partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berbondong-bondong mendampingi calon bupati dan calon wakil bupati yang di usung yaitu Mahfudhoh Sunyoto dan Kuswiyanto.

Mahfudhoh dikenal sebagai sosok yang aktif sebagai penggerak ibu-ibu PKK daerah, sebab selama pemerintahan suaminya, beliau telah banyak menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan keperempuanan dan anak-anak di daerahnya. Dalam orasinya pada saat kampanye, Mahfudhoh menyampaikan bahwa ia akan meningkatkan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang sejahtera, damai, berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk mewujudkan itu, Mahfudhoh berjanji akan menggalakkan perusahaan-perusahaan untuk membangun usahanya di desa-desa agar menciptakan lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu industri pariwisata akan dikembangkan lagi agar

mampu menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk program yang diinisiasi oleh Mahfudhoh adalah program pemberdayaan ibu-ibu permata yang didukung penuh oleh operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, salah satu program menarik yang digagas oleh Mahfudhoh dalam organisasi tersebut adalah mengajak semua elemen masyarakat untuk menyiapkan generasi unggul dan memiliki kecakapan hidup dengan menerapkan pola asuh anak yang baik dan benar. Mendidik anak, kata Bu Yoto, sapaan akrabnya, harus dengan kasih sayang dan kelembutan. Bukan dengan kekerasan fisik. Karena, anak bukanlah musuh yang harus diperlakukan dengan bentakan maupun kekerasan lainnya. Mahfudhoh mencontohkan, jika membiasakan didikan dengan kekerasan, bentakan, dan amarah, maka seperti itu juga sikap dan karakter anak. Sehingga, pentingnya mendidik anak dengan kasih sayang akan menghasilkan generasi muda yang cakap dan saling menghargai.

Cabup yang diusung PAN dan Nasdem itu juga akan meneruskan pembangunan jalan sampai di lingkungan sehingga akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan berjalan dengan baik. Peningkatan SDM juga menjadi bagian program MK yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan jika terpilih menjadi Bupati Bojonegoro. Menurut Mahfudhoh,

dengan SDM yang mumpuni akan meningkatkan daya saing warga Bojonegoro. Mahfudhoh juga menyampaikan pentingnya keterbukaan pemerintahan agar masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Dirinya juga berjanji akan mewujudkan lingkungan sehat, dan secara bertahap membantu masyarakat tidak mampu agar memiliki rumah layak huni.

Ketika maju menjadi calon bupati, Mahfudhoh atau yang lebih akrab dipanggil Bu Yoto menyatakan bahwa ia melakukan sholat istikharah untuk maju pada pilkada tahun ini. Mahfudhoh sendiri tidak memiliki latar belakang sebagai politisi. Dalam pencalonannya ini dia murni memang ingin memajukan Bojonegoro.

Sedangkan wakilnya yakni Kuswiyanto, atau biasa dipanggil Pak Kus, memiliki latar belakang seorang pendidik, yang sementara ditinggalkan untuk menjadi politisi. Kuswiyanto lahir di Kabupaten Ponorogo, 31 Desember 1965 atau saat ini berusia 53 Tahun. Pak Kus dikenal religius tetapi juga dikenal suka blusukan. Pendidikan Kuswiyanto dimulai di SDN Klebu, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Kemudian melanjutkan ke SMPN Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo. Pak Kus, panggilannya, memilih di Sekolah Pendidikan Guru di SPG Muhammadiyah Ponorogo. Untuk tingkat strata 1, Pria yang juga Wakil Sekjen DPP PAN ini, kuliah selama 7 tahun di Universitas Muhammadiyah Surabaya dari tahun 1985 dan lulus tahun 1992.

Tidak berhenti sampai S1, pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini, juga menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Universitas Airlangga pada tahun 2001. Selain itu Ayah dari 2 Anak ini juga pernah mengenyam kursus singkat di Masasuchett di Amerika Serikat. Kuswiyanto melaporkan harta kekayaanya sebesar Rp. 14.899.835.266 atau Rp 14,8 miliar lebih. Kuswiyanto mulai meniti karir sebagai Pendidik di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dan menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 1998 hingga 2004. Pria beristrikan Fitrijah Hidayati, S.Pd ini, menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Timur selama dua periode, yaitu dari 2004-2009, dan 2009-2014.

Karier politiknya terus moncer dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Tuban-Bojonegoro tahun 2014-2019. Kini politisi Partai Amanat Nasional ini, harus mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI, setelah resmi menjadi Calon Wakil Bupati Bojonegoro. Paslon Mahfudhoh – Kuswiyanto berkomitmen dengan visi “Mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang damai, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan”

3. Strategi Pemenangan Pasangan Mahfudhoh-Koeswiyanto

Adapun strategi pemenangan kandidat Mahfudhoh dan Kuswiyanto didasarkan atas beberapa hal.

a. Menggunakan ketokohan Mantan Bupati Sunyoto

Suyoto, membeberkan alasannya mendukung istrinya, Mahfudhoh, maju sebagai bakal calon bupati dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro pada 27 Juni 2018 mendatang. Selain nama Mahfudhoh sudah tidak asing lagi di masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu PKK, Suyoto berkeyakinan istrinya mampu meneruskan perjuangannya untuk mencintai masyarakat Bojonegoro. Bupati dua periode yang jabatannya akan habis pada Maret 2018, itu menginginkan dengan majunya Mahfudhoh di pentas politik ini dapat memberikan dan mengawal perubahan supaya terjadi keseimbangan baru yang lebih baik di Bojonegoro.

Bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini mengakui majunya Mahfudhoh dalam pesta demokrasi lima tahunan ini memunculkan anggapan masyarakat terhadap dirinya yang *power sindrom* atau takut kehilangan kekuasaan. Selain itu ada juga yang menyebut dirinya haus kekuasaan. Kang Yoto mengungkapkan, Mahfudhoh sebenarnya sejak awal tidak punya keinginan masuk dalam dunia politik. Karena itulah PAN kemudian mengusung Kuswiyanto sebagai kandidat dalam Pilkada Bojonegoro. Namun karena dua kali calon wakilnya mundur, maka nama Mahfudhoh kemudian muncul. Suyoto juga menampik anggapan politik dinasti yang muncul di pikiran banyak orang pasca pencalonan istrinya. Untuk

diketahui, Mahfudhoh Suyoto mendapat rekomendasi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Surat rekom tersebut diberikan hari ini serentak di Surabaya. Mahfudhoh akan dipasangkan dengan Kuswiyanto dari PAN. Pasangan tersebut diharapkan bisa menjalankan cita-cita besar Partai NasDem di Bojonegoro, yakni restorasi Indonesia untuk Gerakan Perubahan⁴².

Hal ini menunjukkan meskipun di dukung habis-habisan oleh suaminya sendiri, hal ini tidak lantas Mahfudhoh bisa dengan mudah meraih hati rakyat, bila dicermati secara lebih mendalam pergeseran perilaku pemilih dalam beberapa pilkada di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan pemilih tidak hanya menentukan pilihannya berdasarkan identifikasi kepartaian, melainkan mulai menggunakan isu dan performa kandidat sebagai referensi pilihannya. Keengganan Mahfudhoh untuk maju sebagai pulbub bisa jadi terasa dalam kegiatan kampanye-nya, atau peranan suaminya yang terlalu menonjol sehingga bisa dengan mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Seringkali kita ketahui bahwa pilihan pada loyalitas partai kini telah bergeser akibat adanya ketidakpercayaan (*distrust*) kepada partai dan figur calon dengan cara melakukan *non voting* (Golput) dan *protest voting*, dengan memilih figur-figur alternatif yang kebanyakan dicalonkan oleh partai kecil dan menengah.

⁴² <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/mahfudhoh-maju-karena-mencintai-rakyat-bojonegoro>
akses pada 7 Oktober 2019

Kekalahan beberapa partai besar di beberapa pilkada disebabkan, pertama mesin partai politik tidak bekerja dengan baik karena terjadi fragmentasi internal dan proses rekrutmen yang tidak demokratis. Kedua, menurunnya tidak kepercayaan (*distrust*) pemilih termasuk pemilih loyal partai dengan melakukan dua hal; non voting dan proset voting. Dan, Ketiga, pemilih rasional yang gampang berayun (*swing voters*) mulai menyukai figur-figur alternatif yang diusung oleh partai-partai kecil dan menengah.

b. Kampanye *Door To door* (agenda kunjungan dan pendekatan personal)

Sejak ditetapkan menjadi calon dan masuk masa kampanye Pilkada, masing masing calon terus melakukan pendekatan dan pengenalan ke masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Mulai dari *ngelawang* dari pintu ke pintu atau lewat forum forum pertemuan majelis ta'lim, pengajian, paguyuban dan lain lain, mereka lakukan.

Selain itu juga melalui pemasangan baliho, panflet yang terpampang di jalan raya, kampung dan seterusnya. Tidak heran jika tempat tempat strategis dan perempatan jalan raya marak gambar gambar penuh senyum dan berharap. Cara pendekatan yang dilakukan oleh Bacabup 'Neng' Mahfudhoh, panggilan, antara lain adalah dengan menggunakan cara silaturahmi kembali ke

habitatnya-yakni ormas NU, dimana ia adalah salah satu putri dari tokoh mantan rois Syuriah PCNU Lumajang

Istri mantan bupati Suyoto itu dalam berbagai kesempatan rajin bertemu masyarakat dalam acara yang dikemas dalam bentuk pengajian dan bershalawat Nabi Muhammad SAW, lewat pembacaan sastra Kitab karya Syeh Abdurrahman Al-diba'i atau masyarakat sering menyebut diba'an bersama jamaah-jamaah di majelis pengajian.

Tentu sangat beralasan karena alumnus pesantren Jombang ini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Pendekatan melalui budaya tradisional masyarakat santri ini adalah keniscayaan untuk mendapat simpati pemilih dari kelompok santri NU. Karena seperti kembali ke habitat itulah tidak berlebihan jika suaminya Suyoto dalam berbagai kesempatan mengakui, lebih mudah Mahfudhoh ketimbang dirinya untuk memenangi Pilkada di Bojonegoro. Pasalnya, Mahfudhoh berada dalam habitatnya, sehingga lebih mudah dikenal ketimbang dirinya yang kader Muhammadiyah, baik pada pilkada periode pertama atau kedua dia menjabat⁴³.

Dari strategi ini bila dicermati memang tidak ada hal yang salah, semua kandidat menggunakan pola seperti itu, namun bila diamati dari banyaknya kekalahan, sebutlah Mahfudhoh adalah istri

⁴³ <https://detakpos.com/politik/dua-srikandi-mahfudhoh-rajin-dibaan-anna-sindiran/> akses pada 7 Oktober 2019

dari seorang petahana yang bertahan 2 periode jabatan, yakni Kang Nyoto. Belajar dari Pilkada sebelumnya di tahun 2016-2017 juga kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta, Rano Karno yang kalah di Provinsi Banten serta para keluarga Petahana-petahan lain yang di kabupaten/kota lain di Indonesia.

Artinya para petahana mulai melakukan instropkesi dalam kepemimpinannya, dimana politik kekinian masyarakat Indonesia mulai cerdas dan pintar melihat setiap calon pemimpin daerah, rakyat sudah mulai muak dengan janji-janji politik, rakyat sudah mulai tidak percaya dengan kepalsuan perbuatan (alias pencitraan).

Belajar dari Pilkada sebelumnya di tahun 2016-2017 juga kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta, Rano Karno yang kalah di Provinsi Banten serta para keluarga Petahana-petahan lain yang di kabupaten/kota lain di Indonesia. Artinya para petahana mulai melakukan instropkesi dalam kepemimpinannya, dimana politik kekinian masyarakat Indonesia mulai cerdas dan pintar melihat setiap calon pemimpin daerah, rakyat sudah mulai muak dengan janji-janji politik, rakyat sudah mulai tidak percaya dengan kepalsuan perbuatan (alias pencitraan).

Dalam kajian politik, tak bisa kita (petahana) salahkan siapapun, mulai dari mesin politik (partai pengusung), para tim sukses dan orang-orang yang berjuang bersama petahana, karena biasanya tim sukses dan partai politik sudah melakukan segala cara

demi kemenangan kandidatnya. Siapakah yang di salahkan, bukan tim dan bukan partai, penulis lebih cenderung menitikberatkan pada kandidat yang bertarung, dimana kandidat kadang mengalami persoalan politik dalam kepemimpinan sebelumnya, lima tahun lalu itu ada segudang persoalan, namun tak pernah di evaluasi, apa yang salah, kandidat petahana kadang merasa aman dan merasa berkuasa, sehingga tak perlu berhati-hati dalam melangkah periode kedua.

Dalam politik banyak masyarakat mulai tidak suka dengan status quo, banyak juga masyarakat Indonesia ingin ada perubahan, dan kebanyakan masyarakat Indonesia menginginkan bukti dalam kepemimpinannya, bukan sekedar kepemimpinan memperkaya keluarga, kepemimpinannya hanya peduli keluarga dekat, tetapi penting sekali bahwa kepemimpinan politik harus berwajah perubahan, berwajah baru, berwajah adil, berwajah jujur dan berwajah bukti. Persoalan diatas itulah membuat para petahana, keluarga petahana dan kawakan petahana berada di ujung kekalahan⁴⁴.

c. Persuasi Basis TPS di desa-desa

Salah satu hal yang dilakukan oleh mantan Bupati Sunyoto, sebulan sebelum lengser adalah dengan melakukan pengamanan Hal itu ditunjukkan dengan ia tengah berusaha menyusun kembali

kekuatan politiknya di beberapa wilayah Kecamatan yang mulai kedodoran dan kehilangan dukungan.

Kecamatan Malo, Kedewan, Padangan, Gayam, dan Sekar, yang sekarang ditengarai sebagai wilayah rawan dukungan terhadap Mafudah – Kuswiyanto, menjadi garapan kerja politik Suyoto. Kelima Camat di wilayah tersebut pun dibongkar. Meski hanya melakukan langkah lukir, Suyoto nampaknya ingin kembali memperkuat pengaruh politiknya di kelima Kecamatan tersebut melalui orang-orang kepercayaan⁴⁵.

Salah satu isu yang dibawa oleh pasangan Mahfudhoh dan Kuswiyanto dalam menggalang pendukung adalah dengan membeberkan mengenai bagaimana memperjuangkan dana abadi migas yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab dana abadi migas dinilai sangat penting bagi masyarakat Bojonegoro, setelah potensi minyak dan gas bumi (migas) yang terkandung di dalam perut bumi di Bojonegoro habis, masyarakat masih bisa menikmati uangnya. Pada 2026 jika migas sudah habis, maka Jamkesda bagi masyarakat akan hilang, beasiswa pelajar tingkat SMA sederajat juga akan berhenti. Sehingga dengan adanya dana abadi migas rakyat akan tetap menikmatinya meski migas sudah habis. Selain dana abadi migas, yang juga menjadi prioritas adalah transparansi anggaran dan program pemerintah yang sudah

⁴⁵ <https://netpitu.com/baca/08/02/2018/antara-mutasi-dan-strategi-pilkada-suyoto/>
akses pada 7 Oktober 2019

dibangun sejak masa kepemimpinannya harus diteruskan. Sehingga masyarakat akan mudah mengakses informasi pembangunan⁴⁶.

Dalam sebuah konstelasi politik, menang atau kalahnya seorang kandidat juga dipengaruhi oleh kemampuan timses dalam mengkampanyekan kandidatnta. Timses dalam hal ini harus mampu membuat strategi kampanye yang efektif agar kandidatnya dapat dilihat dari efektivitas kampanye yang dilakukan oleh timses. Seperti yang dikatakan oleh pengamat politik Veri Muhlis Ariefuzzaman, “Dalam pemilu, kampanye yang sukses itu kampanye yang mampu memenangkan kandidatnya. Semahal apapun kampanye kalau kandidatnya kalah ya timsesnya gagal mengkampanyekan kandidate.”

Kegiatan kampanye merupakan momentum yang harus dijalankan sebaik mungkin agar dapat menarik suara pemilih sebanyak-banyaknya. Dalam prosesnya timses harus memiliki strategi yang matang sehingga mampu mengajak warga untuk memilih kandidat yang diusung. Sementara timses Mahfudhoh menyampaikan bahwa fokus dari timses adalah menyampaikan mengenai kinerja Mahfudhoh sebagai seorang istri bupati petahana 2 periode, sehingga layak dan mampu untuk menggantikan posisi suaminya. Namun hal lain justru dibaca oleh masyarakat bahwa apa yang dicitrakan oleh timses Mahfudhoh ini ternyata menunjukkan

⁴⁶http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/331682/kampanye_akbar_pasangan_mahfudhoh-kuswiyanto_datangkan_nisa_sabyan.html akses pada 07 Oktober 2019

bahwa Mahfudhoh masih sangat lekat dengan citra Bupati Sunyoto, sehingga hal ini kemudian justru akan menimbulkan pertanyaan, apakah nantinya jika Mahfudhoh memimpin apakah tetap akan dibayangi oleh Bupati Sunyoto. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan tersendiri dalam penilaian masyarakat, sehingga bisa dikatakan timses Mahfudhoh salah fokus tidak menonjolkan peranan dan kiprah Mahfudhoh di Bojonegoro keluar dari bayangan suaminya. Sehingga bisa dikatakan timses Mahfudhoh salah fokus dalam mengolah Mahfudhoh sebagai calon pemimpin yang terpercaya.

4. Identifikasi Modal Mahfudhoh – Koeswiyanto

a. Modal Ekonomi

Modal ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam kegiatan kampanye pemilihan bupati. Dalam data Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) di KPUD Bojonegoro menunjukkan adanya dana yang cukup tinggi dimiliki oleh para bakal calon bupati. Kewajiban LHKPN ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 huruf (k) disebutkan calon pimpinan daerah menyerahkan daftar kekayaan pribadi sebagai salah satu syarat pencalonan.

Sesuai rilis KPK, harta kekayaan bacabup Anna Mu'awanah yang dilaporkan sebesar Rp 58.396.570.453. Harta kekayaan itu dilaporkan pada tanggal 16 Januari 2018. Di urutan kedua daftar harta kekayaan terbesar adalah Bacabup Mahfudhoh sebesar Rp.13.671.742.852 dilaporkan tanggal 11 Januari 2018. Disusul Bacabup Basuki Rp 9.601.050.182 yang dilaporkan tanggal 17 Januari 2018, dan bacabup Soehadi Moeljono sebesar Rp5.512.229.855 yang dilaporkan pada pertama kali yakni tanggal 29 Desember 2017.

Sedangkan untuk harta kekayaan bacawabup Bojonegoro, Kuswiyanto Rp. 14.899.835.266 yang dilaporkan tanggal 9 Januari 2018. Disusul diurutan kedua bacawabup Budi Irawanto sebesar Rp7.336.288.273 dilaporkan tanggal 7 Januari 2018. Kemudian Bacawabup Pudji Dewanto sebesar Rp.2.358.000.000 dilaporkan pada tanggal 10 Januari 2018, dan laporan harta kekayaan paling kecil adalah Mitroatin sebesar Rp.2.330.170.00 yang dilaporkan pada tanggal 5 Januari 2018. Maka, jika ditotal kekayaan pasangan Mahfudhoh dan Kuswiyanto senilai Rp 13.671.742.852 dan Kuswiyanto Rp 14.899.835.266⁴⁷. Dari rilis yang dikeluarkan lembaga antirasuah, harta kekayaan bacabup Anna Mu'awanah diketahui paling besar, dan bacabup Soehadi Moeljono paling kecil. Sementara untuk

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3834983/ini-kekayaan-paslon-peserta-pilbup-bojonegoro> akses pada 07 Oktober 2019

harta kekayaan bacawabup Bojonegoro paling besar yakni Kuswiyanto, dan paling kecil adalah Mitroatin⁴⁸.

Tak hanya modal aset tabungan, aset bergerak dan non gerak, termasuk hutang juga dilakukan penghitungan oleh LHKPN yang ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, data tersebut disampaikan ke KPU Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data LHKPN itu disebutkan, empat calon yang nihil hutang adalah Mitroatin, Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Soehadi Moeljono. Selanjutnya, Calon Bupati Mahfudhoh dan Calon Wakil Bupati Kuswiyanto yang diusung oleh PAN, Hanura serta Nasdem. Berikutnya Budi Irawanto pasangan dari Anna Muawanah.

Sementara itu, hutang tertinggi yang diumumkan adalah pasangan nomor urut 3 yaitu Anna Muawanah dengan total hutang lebih dari Rp 16 miliar lebih. Disusul urutan kedua adalah Soehadi Moeljono dengan hutang sebesar Rp 572 juta lebih. Berikutnya Pudji Dewanto dengan Rp 37 juta lebih, dan terakhir Basuki dengan besaran Rp 12 juta lebih⁴⁹.

b. Modal Kultural

Modal kultural yang dimiliki oleh pasangan Mahfudhoh dan Kuswiyanto adalah nama besar dan pengaruh mantan Bupati Sunyoto

⁴⁸ <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/bacabup-anna-dan-bacawabup-kuswiyanto-paling-kaya> akses pada 07 Oktober 2019

⁴⁹ <http://damarkita.com/hutang-para-calon-bupati-wakil-bojonegoro-2018/> akses pada 07 Oktober 2019

sebelumnya, sebab Sunyoto memiliki pengaruh yang sangat besar pada hampir semua kalangan di birokrasi Bojonegoro dengan track record kepemimpinan selama 10 tahun. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bojonegoro sekitar 9.500 orang. Jumlah itu belum termasuk kepala desa dan perangkatnya.

Secara umum, ormas berbasis agama, yakni NU di Bojonegoro lebih terpecah pada 3 calon lain yang memiliki basis ke NU-an yang kuat, khususnya Bacapub Anna Muawanah dan ketiga Bacapub lainnya. Sehingga kemudian suara dari Muhammadiyah dan dukungan PAN dibelakangnya cenderung memilih Mahfudhoh – Kuswiyanto.

Mahfudhoh merupakan istri Bupati Bojonegoro Suyoto yang sudah dua periode memimpin Bojonegoro dan dinilai berhasil dengan kepuasan masyarakat mencapai 73%, sedangkan Kuswiyanto adalah anggota Fraksi PAN DPR RI dari Dapil Bojonegoro – Tuban. Ini merupakan pilihan yang tepat karena masyarakat Bojonegoro masih menginginkan kepemimpinan Kang Yoto, sehingga ditangan kader-kader PAN program-program Kang Yoto bisa dilanjutkan karena memiliki visi misi yang sama⁵⁰.

c. Modal Sosial

Modal sosial di sini adalah berkenaan dengan jaringan dan interaksi sosial, yang kemudian menempatkan aktor antar orang pada

⁵⁰ <https://amanat.news/dua-kader-pan-bergandengan-maju-dalam-pilkada-bojonegoro-2/> akses pada 07 Oktober 2019

posisi yang tidak sama namun berupaya untuk mencapai kepaduan sosial yang saling ketergantungan. Relasi modal sosial yang dimiliki oleh Mahfudhoh dan Kuswiyanto pada masyarakat Bojonegoro adalah kekuatan-kekuatan kolektif yang berasal dari organisasi sosial lain yang sebelumnya lekat dengan keseharian mereka.

Mahfudhoh antara lain kuat ketokohnya sebagai pembina PKK selama 10 tahun di Kabupaten Bojonegoro, ia juga membidani banyak kelompok-kelompok kecil pembinaan perempuan serta wirausahawan perempuan di Bojonegoro. Diakui Mahfudhoh selama 10 mendampingi Kang Yoto sebagai Bupati tidak tinggal diam, ikut membantu menjalankan program pemerintahan, bahkan tiap hari keliling dari desa ke desa dan tidak kurang dari 3 desa yang disinggahi setiap harinya. Ia menggenjot kegiatan pemberdayaan perempuan dengan selalu aktif untuk mengikuti Dekranasda baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Namun pada posisi suara Ormas, beberapa paslon lain nampak lebih berpengalaman. Misalnya massa NU dan Muhammadiyah, paslon Anna Muawanah lebih kuat, karena sebelumnya ia pernah menjabat sebagai PP Muslimat, dan mantan Ketua Umum PPKB. Sedangkan Bacapub Basuki sebelumnya pernah menjabat sebagai pengurus Tanfidziah PC NU, sehingga berpotensi dapat dukungan suara Nadhliyin. Demikian pula dengan Mitroatin, yang keluarga besarnya adalah keluarga besar NU tulen. Maka kondisi ini pada sisi

pengaruh terhadap ormas, Mahfudhoh dan Kuswiyanto sukar untuk mendapatkan suara, namun justru berpotensi lebih besar suara dari pihak Muhammadiyah akan dialihkan

Sejauh ini modal sosial yang paling nampak memang masih kuat mengandalkan pengaruh Bupati Sunyoto dengan klaim yang menyatakan bahwa bagaimana ia telah berhasil membawa Bojonegoro yang keluar dari 10 besar Kabupaten termiskin di Jawa Timur pada tahun 2016. Keberhasilan ini, lanjut dia, karena adanya kerjasama yang baik dan tak terjadi konflik di Kabupaten Bojonegoro ini⁵¹.

d. Modal Simbolik

Menurut Pierre Bourdieu, pada dasarnya modal simbolik (seperti prestise, kehormatan atau karisma) ialah modal lainya ketika di ketahui dan diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekuasaan simbolik yang cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruang sosial. Singkatnya, modal simbolik merupakan hasil dari transformasi dari modal ekonomi, sosial dan kultural kedalam bentuk baru, dan hasil transformasi ini memiliki kekuatan besar⁵².

⁵¹ <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/2737/Kang-Yoto-Ajak-Jaga-Kerukunan-di-Apel-Besar-Kampung-Pesilat-Jelang-Pilkada> akses pada 7 Oktober 2019

⁵² Haryanto, Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakar di Sulawesi Selatan). (Yogyakarta Polgom, 2014). h.17.

Hal yang terbaca dalam kekuatan modalitas politik secara simbolik dari pasangan Mahfudhoh dan Kuswiyanto adalah usaha keras yang dilakukan oleh Bupati Sunyoto sebulan sebelum beliau mangkat jabatan Bupati, beliau banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan posisi istrinya untuk mendukung dinasti politik selanjutnya.

Selain itu, nampaknya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bupati Sunyoto sudah sangat kentara sebulan sebelum ia melepaskan jabatannya sebagai Bupati dan mempersiapkan Mahfudhoh, sang istri untuk meneruskan dinasti politiknya. Hal itu ditunjukkan dengan ia tengah berusaha menyusun kembali kekuatan politiknya di beberapa wilayah Kecamatan yang mulai kedodoran dan kehilangan dukungan.

Kecamatan Malo, Kedewan, Padangan, Gayam, dan Sekar, yang sekarang ditengarai sebagai wilayah rawan dukungan terhadap Mafudah – Kuswiyanto, menjadi garapan kerja politik Suyoto. Kelima Camat di wilayah tersebut pun dibongkar. Meski hanya melakukan langkah lukir, Suyoto nampaknya ingin kembali memperkuat pengaruh politiknya di kelima Kematan tersebut melalui orang-orang kepercayaan⁵³.

⁵³ <https://netpitu.com/baca/08/02/2018/antara-mutasi-dan-strategi-pilkada-suyoto/> akses pada 7 Oktober 2019

BAB IV

Analisis Kekalahan Mahfudoh pada Pemilihan Bupati Bojonegoro

Tahun 2018

4.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kekalahan Kandidat Bupati Mahfudhoh – Koeswiyanto Dalam Pilbup Bojonegoro 2018

Hasil penelitian merupakan pokok tujuan dari peneliti lakukan terhadap permasalahan diawal pokok, penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang secara langsung serta melakukan wawancara secara mendalam. Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa informan yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan pengisian setiap pertanyaan yang peneliti ajukan.

A. Faktor Internal

1. Kurang kuatnya figur Mahfudhoh

Kecenderungan partai politik dalam melakukan penjaringan atau rekrutmen calon-calon kepala daerah dalam pilkada langsung juga berlangsung pragmatis dan tidak jarang menimbulkan potensi perpecahan internal di partai politik. Sebagaimana yang sudah-sudah, kecenderungan penonjolan peran figur juga dibaca partai politik dalam cara melakukan penjaringan nama-nama yang memiliki potensi menang besar. Figur yang memiliki potensi ini tidak harus berasal dari mereka yang memiliki latar belakang sebagai kader internal partai politik itu sendiri, tetapi juga dari kalangan eksternal partai. Dalam hal ini proses seleksi yang dilakukan

partai politik bisa dilakukan dengan melalui mekanisme terbuka atau dengan tertutup.

Rahat dan Hazan (2006), sebagaimana dirujuk Mahadi, menyatakan setidaknya terdapat dua pola sistem seleksi kandidat. Pertama, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (eligible). Di sini, tidak ada semacam keharusan untuk menjadi anggota partai politik terkait, ataupun memiliki kesamaan ideologi.

Pola kedua adalah eksklusif (tertutup), di mana pada pola ini terdapat sejumlah syarat yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Semakin inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis. Sebaliknya, semakin eksklusif seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksinya, karena tidak transparan dan hanya internal elite saja sebagai penyeleksi ataupun penentu kandidat.

Lebih lanjut Rahat dan Hazan menyatakan bahwa terkait dengan perekrutan kandidat secara inklusif, ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota dari luar ini. Pertama, syarat keterjaminan terpilihnya kandidat tersebut (tingkat elektabilitas). Dalam kerangka politik lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur. Rekam jejak dan popularitas ini sangat menentukan dapat diterimanya seseorang oleh masyarakat. Elektabilitas ini bisa menjangkau lintas-kelompok, etnis, agama, dan seterusnya, karena hal-hal yang bersifat konsep dan ideologis telah diabaikan melalui

kompromi. Kedua, pada syarat biaya. Bahwa pertimbangan penentu dalam proses perekrutan kandidat dari orang luar adalah dari segi biaya. Hal ini karena keikutsertaan dalam pilkada membutuhkan biaya tidak sedikit. Kebutuhan dana menjadi inheren dalam pilkada⁵⁴.

Seperti yang sudah sebagaimana disampaikan di bab sebelumnya mengenai rekrutmen dalam pencalonan partai politik, sosok Mahfudhoh sebagai istri dari Kang Nyoto berusaha untuk menggantikan Kang Nyoto menjadi bupati Bojonegoro 2 periode dengan harapan Mahfudhoh ini bisa meneruskan program-program yang sebelumnya sudah dibuat oleh Kang Nyoto sehingga Mahfudhoh harapannya bisa tetap meneruskannya.

Namun bisa dikatakan ketokohan seorang Mahfudhoh ini menjadi figur pemimpin yang kurang kuat, sebab sebagai istri Bupati Sunyoto sebelumnya Mahfudhoh dulunya seolah-olah “tenggelam” dengan dominasi ketokohan Sunyoto suaminya. Hal inipun diperkuat bahwa Mahfudhoh sebenarnya sejak awal tidak punya keinginan masuk dalam dunia politik. Karena itulah PAN kemudian mengusung Kuswiyanto sebagai kandidat dalam Pilkada Bojonegoro. Namun karena dua kali calon wakilnya mundur, maka nama Mahfudhoh kemudian muncul⁵⁵.

⁵⁴ Hanafi, Ridho Imawan. 2014. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Indonesia : Beberapa catatan kritis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jurnal Penelitian Politik | Volume 11 No. 2 Desember 2014 | 1–16

⁵⁵ <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/mahfudhoh-maju-karena-mencintai-rakyat-bojonegoro> akses pada 7 Oktober 2019

2. Partai Pendukung

Menurut Miriam Burdiardjo dalam buku dasar dasar ilmu politik, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Kekuasaan partai politik sangat kuat untuk menentukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Peran partai politik tampak dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yang merupakan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam UU diatur, partai politik

maupun gabungan partai politik dapat mengajukan bakal calon kepala daerah bila memiliki 20 persen kursi di DPRD maupun 25 persen suara sah perolehan dalam pemilu legialastif DPRD 2014. Artinya bila partai politik tersebut memiliki kursi lebih dari 20 persen di DPRD ataupun perolehan suara lebih dari 25 persen, dapat mengajukan sendiri. Namun bila tidak, maka harus bergabung dengan partai lainnya agar memenuhi jumlah kursi 20 persen atau 25 persen suara untuk dapat mengajukan bakal calon kepala daerah. Untuk mengajukan nama bakal calon tersebut, tentunya partai politik harus memiliki kepengurusan yang sah Secara umum sistem kepartaian di Indonesia tak dapat dilepaskan dari eksistensi kepengurusan di pusat. Solid tidaknya kepengurusan pusat parpol dapat berpengaruh pada pilkada. Bila rezim pilkada serentak identik dengan pemilu nasional, eksistensi dan peran maka kepengurusan parpol dari pusat sangat menentukan. Dalam kaitan inilah, kita melihat hubungan tidak langsung antara kedewasaan parpol dalam memperkuat soliditas dan kelembagaannya. Karena itulah, realitas konflik di parpol, merupakan tantangan, tidak saja bagi masa depan parpol itu, tetapi juga dalam konteks masa depan kepemimpinan lokal.

Dikaitkan dengan fenomena kekalahan Mahfudhoh dan Koeswiyanto, kedua paslon tersebut mewakili masing-masing partai politik, yakni Mahfudhoh menggunakan partai politik Nasdem, sedangkan Koeswiyanto menggunakan partai politik PAN. Dalam konstelasi kekuatan politik di Bojonegoro, sebenarnya Partai Nasdem ini

cukup dipercaya secara kredibilitas ataupun integritasnya, hal ini lantaran Nasdem mengusung jargon “politik tanpa mahar” yang membuat Nasdem kemudian memiliki citra positif dibanding konstituen politik yang lainnya.

Secara nasional juga elektabilitas Nasdem juga meningkat, meskipun Nasdem bisa dikatakan sebagai partai pemain baru, sebab Nasdem masih berusia 9 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan Berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional KPU, Partai NasDem meraup 12.661.792 (9,05 persen). Angka itu lantas menempatkannya pada lima besar Pileg 2019 di bawah PDIP, Gerindra, Partai Golkar, dan PKB. Pada Pemilu 2014, partai yang mengusung slogan 'Restorasi Perubahan' itu hanya meraih 6,72 persen. Angka itu lantas mengalami kenaikan hingga 2,97 persen pada Pemilu 2019.

Pada proses pembahasan UU Pemilu, partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini juga berani menyodorkan nilai ambang batas parlemen alias *parliamentary threshold* 7 persen. Pertama, NasDem sendiri memiliki berbagai modal kekuasaan yang besar yang mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam Pemilu 2019 ini. Pertama, modal efek ekor jas atau *coattail effect* paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Dua parpol lain yang mendapatkan keuntungan serupa adalah PDIP dan PKB. Kedua, jargon kampanye 'politik tanpa mahar'. Jargon itu, membuat masyarakat dan para calon anggota legislatif terpesona. Ia menyatakan jargon tersebut sangat ampuh untuk membentuk citra diri

NasDem menjadi lebih positif. Selain itu, jargon tersebut membuat caleg-caleg petahana dari parpol lain maupun caleg muda untuk masuk Partai NasDem. Berdasarkan data yang dihimpun, NasDem mengusung 50 caleg petahana dari total 575 caleg DPR RI di Pileg 2019. Tak hanya itu, beberapa kepala daerah turut memutuskan maju sebagai calon legislatif dari NasDem.

Tak hanya itu, Nasdem sendiri merupakan parpol yang berkiblat pada hasil survei untuk menentukan caleg yang dapat dipertimbangkan untuk maju di beberapa wilayah dalam Pemilu 2019. Hal itu bertujuan untuk memberikan prediksi perolehan suara. Modal ketiga NasDem, lanjut Usep, adalah kekuatan media dan finansial yang dimiliki Surya Paloh. Kedua modal itu dapat dikombinasikan sehingga Nasdem terus menerus memberi informasi kepada masyarakat. Diketahui, Surya Paloh sendiri menggawangi beberapa perusahaan media yang bernaung di bawah bendera Media Group.

Tak berhenti disitu, Nasdem memiliki kriteria khusus bagi caleg yang akan dipilih untuk bertarung di Pileg 2019. Kata dia, Nasdem memilih kriteria caleg yang memiliki finansial yang cukup dan elektabilitas tinggi di tiap-tiap daerah pemilihan. Bagaimanapun, Nasdem yang dibangun oleh kalangan profesional, maka Partai NasDem bersikap

profesional meskipun kader-kadernya dipercaya untuk memegang amanah di kursi pemerintahan⁵⁶.

Pada satu sisi lainnya, paslon Anna – Wawan menggunakan PKB dan PDIP sebagai partai pengusung mereka. Sebagai anggota DPRD 3 periode Anna Muawanah cukup memahami medan politik Bojonegoro, sejak awal kader PKB ini memang memiliki banyak investasi politik selama ia menjabat sebagai anggota DPRD. Hal ini ditunjukkan dengan kesetiannya konstituennya sejak tahun 2004, dimana pada Pemilu Legislatif 2004-2009, Anna mendapatkan sekitar 79.355 suara, kemudian Pileg 2009-2014 ia kembali terpilih dengan perolehan suara 44.425, lalu pada periode terakhir 2014-2019 suara Anna sebesar 95.621⁵⁷.

Maka, dari uraian tersebut menunjukkan bahwa basis kekuatan pengaruh partai terhadap konstituen pemilihnya di Bojonegoro tetap lebih kuat PKB dan PDIP dibandingkan gabungan partai pengusung Mahfudhoh yakni Nasdem, PAN dan Hanura. Hal ini dibuktikan dengan perolehan kursi terbanyak diraih Partai Kebangkitan Bangsa mendapat suara 10 kursi, lalu Partai Gerindra mendapat 6 kursi, PDIP dan Golkar mendapat 5 kursi, NasDem 3 kursi, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1 kursi, PKS dapat 2 kursi. Kemudian Partai Persatuan Indonesia dapat 2

⁵⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521104717-32-396793/tiga-modal-dulang-suara-ala-partai-nasdem> akses pada 08 Desember 2019

⁵⁷ <https://kumparan.com/blokbojonegoro/apakah-wawan-jadi-pasangan-anna-di-pilbup-bojonegoro> akses pada 08 Desember 2019

kursi, PPP dapat 4 kursi, PAN dapat 3 kursi, Hanura 1 kursi, Demokrat 6 kursi, PKPI dapat 2 kursi⁵⁸.

3. Lemahnya Modal Ekonomi

Selain modal sosial, dalam kontestasi politik termasuk pemilu maka secara langsung jelas membutuhkan biaya (modal capital/ekonomi). Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye, yang tidak kalah pentingnya membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk didalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya tahapan kampanye. Modal ekonomi memiliki makna penting menjadi “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye, misalnya membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk pengamanan. Bahkan, modal ekonomi ini merupakan prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, ditotal kekayaan pasangan Mahfudhoh dan Kuswiyanto senilai Rp 13.671.742.852 dan Kuswiyanto Rp 14.899.835.266⁵⁹. Dari rilis yang dikeluarkan lembaga antirasuah, harta kekayaan bacabup Anna Mu'awanah diketahui paling

⁵⁸ <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/22/berikut-jumlah-perolehan-kursi-partai-di-bojonegoro-pasca-resmi-dilantik> akses pada 08 Desember 2019

⁵⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3834983/ini-kekayaan-paslon-peserta-pilbup-bojonegoro> akses pada 07 Oktober 2019

besar, dan bacabup Soehadi Moeljono paling kecil. Sementara untuk harta kekayaan bacawabup Bojonegoro paling besar yakni Kuswiyanto, dan paling kecil adalah Mitroatin⁶⁰.

Faktor *money politics* dalam setiap pemilihan langsung adalah sesuatu yang tidak terelakkan. *Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁶¹ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.⁶²

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.⁶³ Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

⁶⁰ <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/bacabup-anna-dan-bacawabup-kuswiyanto-paling-kaya> akses pada 07 Oktober 2019

⁶¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

⁶² Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http:// Wwww.Panwaslu, Jum'at](http://www.panwaslu.jum'at)

⁶³ Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

Lebih lanjut, dari perbedaan antara modal ekonomi milik Mahfudhoh dengan modal ekonomi milik pesaingnya Anna Muawanah menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, yakni harta kekayaan bacabup Anna Mu'awanah yang dilaporkan sebesar Rp 58.396.570.453 sementara urutan kedua daftar harta kekayaan terbesar adalah Bacabup Mahfudhoh sebesar Rp.13.671.742.852 terdapat selisih senilai Rp. 44.724.828, 878 rupiah.

Kemudian setelah ditindaklanjuti sampai pada audit akhir dana kampanye yang dilakukan tim audit independen seperti diterangkan oleh Arifin Ali (Komisioner KPU Bojonegoro) menunjukkan bahwa dana yang digunakan oleh Machfudhoh dalam kampanyenya senilai 12.897.098,009 rupiah, dia juga menerima beberapa dana kampanye yang disumbangkan oleh beberapa orang senilai Rp. 209.000.000,-. Sementara Bacabup Anna Muawanah dan dalam kegiatan kampanyenya menghabiskan dana senilai 35.689.098.890, dan ia menerima sumbangan dari beberapa orang senilai 189.340.800 juta⁶⁴.

Isu mengenai *money politics* tersebut menjadi isu tersendiri dalam Pilbub Bojonegoro ini, bahkan hal tersebut diakui secara langsung oleh Ferdy tim sukses Mahfudhoh – Koeswiyanto bahwa tak ada pemilu yang tidak menggunakan money politics, berikut adalah kutipan hasil wawancaranya :

⁶⁴<http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/dana-kampanye-bacabup-anna-dan-bacawabup-kuswiyanto-paling-kaya> akses pada 07 Oktober 2019

“Ya tentu sajalah mbak... yang namanya *money politics* itu ndak bisa lepas dari setiap pemilihan kepala daerah, termasuk di Bojonegoro. Secara praktik di lapangan hal itu terjadi. Tapi khan di bawah tangan. Ndak mungkin secara terang-terangan. Tapi itu memang terjadi. Saya ini tim survey lapangan yang turun sendiri ke lapangan, saya blusukan dari desa ke desa untuk menggalang opini door to door. Hampir 80% saya yakin bahwa masyarakat itu menginginkan Mahfudhoh – Koeswiyanto. Banyak yang masih mengagumi sosok Pak Nyoto. Jadi saya rasa, misalnya tanpa *money politics* tersebut, kami yakin kubu kami bisa memenangkannya.”

Sementara disisi lainnya, kami juga melakukan wawancara pada tim sukses dari Ibu Anna Muawanah – Irawan, yakni Bpk Wahyudi, yang menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan apa yang dikatakan oleh Bpk Ferdy, berikut adalah kutipannya :

“Politik tanpa uang itu ibarat makan sayur tanpa garam istilahnya. Ya memang yang namanya *money politics* itu praktiknya memang ada, nggak usah dipungkiri lagi. Tapi apa ya cuman *money politics* yang paling utama? Khan ya ndak? Pasti banyak faktor-faktor pendukung lainnya yang kemudian jika pertimbangan masyarakat juga. *Money politics* itu ada, tapi masyarakat sekarang jugaa udah pada cerdas dan pinter untuk menilai siapa yang bagus dan siapa yang sekedar ikutan. Ini pemilihan daerah lo ya, dan ini Bojonegoro, meskipun juga ndak kota banget, tapi kita nggak bisa menampik banyak konstituen pemilih yang cerdas diluar sana. Bisa menilai dan bisa menalar sendiri siapa memang pemimpin yang bagus. Masih ada banyak hal yang tidak bisa ditransaksikan dengan investasi uang, salah satunya ketokohan menurut saya, figur dan dukungan partai itu lebih penting daripada *money politics*.”

Dari apa yang disampaikan oleh kedua orang tersebut menunjukkan bahwa *money politics* adalah sesuatu yang jamak dalam suatu konstelasi politik dalam pilkada. Namun terlepas dari itu ada banyak faktor lainnya yang tidak bisa dinafikan ikut mendukung dalam setiap kondisi politik yang terjadi.

B. Faktor Eksternal

1. Stigma masyarakat tentang Dinasti politik

Antara istilah dinasti politik ataupun politik dinasti merupakan dua hal yang berbeda. Dalam sebuah dinasti politik adalah sebuah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari beberapa orang. Sebuah politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang memiliki tujuan agar mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dalam sebuah dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya.

Jaringan politik yang dibangun oleh sebuah dinasti politik biasanya memiliki kedekatan politik keluarga sehingga tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Turner (dalam Bathoro, 2011:118), bahwa suatu kelompok jaringan memiliki pengaruh penting terkait dinamika transisi kekuasaan politik sehingga berdampak terhadap tertutupnya sebuah rekrutmen politik. Robert A Dahl (1982: 10-11) dalam bukunya yang berjudul *"Dilemma of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control"* mengemukakan beberapa kriteria mewujudkan suatu sistem demokratis yang terkonsolidasi, yaitu:

- 1) *control over government decisions about policy is constitutionally vested in elected officials,*
- 2) *elected officials are chosen in frequent and fairly conducted elections in which coercion is comparatively uncommon,*
- 3) *practically all adults have the right to vote in the election of office,*
- 4) *practically all*

adults have the right to run for elective offices in the government, thoughage limits may be higher for holding office than for the suffrage, 5) citizens have a right to express themselves without the danger of severe punishment onpolitical matters broadly defined, including criticism of officials, the government, the regime,the socioeconomic order, and the prevailing ideology, 6) citizens have a right to seek out alternative sources of information. Moreover, alternativesources of information exist and are protected by law, dan 7) to achieve their various rights, including those listed above, citizens also have a right toform relatively independent associations or organizations, including independent politicalparties and interest groups.

Kriteria *democratic political order* yang dikemukakan oleh Robert A Dahl dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam mewujudkan demokrasi dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Hal ini juga berlaku di Indonesia, dimana banyak sekali terdapat kasus dinasti-dinasti politik yang kemudian tersandung dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kepercayaan, yang paling umum adalah kasus korupsi. Misalnya, kasus terbaru adalah Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun, yang merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara terlibat kasus suap. Anak dan ayah itu diduga menerima suap-suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari tahun 2017-2018. Uang suap berasal dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Suap itu digunakan Asrun untuk biaya politiknya maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada 2018. Asrun yang pernah berkuasa 10 tahun sebagai Wali Kota Kendari sejak 2007-2017 menggunakan mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih, untuk jadi penghubung

dengan pihak pemberi suap, dalam hal ini Hasmun. Kemudian, anak Asrun, Adriatma, yang merupakan Wali Kota Kendari periode 2017-2022 itu diduga berkomunikasi dengan Hasmun untuk meminta uang bagi kepentingan biaya politik ayahnya. Total suap yang diberikan diduga Rp 2,8 miliar.

Kasus dinasti politik lainnya yang tak kalah menarik perhatian adalah Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten. Atut merupakan tersangka sejumlah kasus korupsi bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Terdakwa Atut Chosiyah menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan dan ajudan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Almin Aling, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Atut didakwa terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kasus itu yakni kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa pilkada Lebak. Kemudian kasus korupsi pengadaan alkes di Pemerintah Provinsi Banten. Dinasti Banten tak hanya dibangun Atut di jajaran pemerintah daerah, tapi juga antarprovinsi dan lembaga legislatif.

Anak Atut, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009-2014, sementara istrinya Ade Rossi Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009-2014. Begitu pula dengan Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut yang menjadi Wakil Bupati

Kabupaten Serang 2010-2015. Dinasti Banten keluarga Atut berawal dari sang ayah, Tubagus Chasan Sohib. Pria yang dikenal memegang kendali Banten itu mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001.

Kasus Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari menunjukan dinasti politik di suatu daerah kental dengan korupsi. Sebelum Rita tersandung kasus korupsi, ayah Rita, yang juga mantan Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani Hassan Rais lebih dulu menjadi terpidana kasus korupsi. Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara Rita Widyasari tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Rita diperiksa perdana sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian izin lokasi inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kalimantan Timur. Syaukani merupakan terpidana penyalahgunaan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar. Sementara Rita, merupakan tersangka tiga kasus korupsi.

Kasus pertama yakni terkait suap pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima. Dalam kasus ini, dia menerima suap Rp 6 miliar. Kasus berikutnya yakni Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Dia diduga menyamakan

gratifikasi senilai Rp 436 miliar. Dia juga menjadi tersangka pencucian uang karena menyamarkan gratifikasi⁶⁵.

Dikaitkan dengan penelitian ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh Sunyoto tersebut dimaknai masyarakat konstituen Bojonegoro sebagai upaya-upaya untuk melanggengkan peranan dinasti politik Sunyoto sebelumnya yang menjabat sebagai Bupati 2 periode di Bojonegoro, sehingga kemudian mengajukan istrinya untuk maju menggantikannya. Dari sebuah wawancara juga terungkap bahwa ia menyatakan bahwa istrinya mampu meneruskan perjuangannya. “Karena saya berkeyakinan Bu Yoto bisa meneruskan perjuangan saya, dan saya juga tidak ingin menjadi penonton di Pilkada nanti,”. Sunyoto mengucapkan statement ini saat diwawancara oleh awak media di Bojonegoro. Saat disinggung apakah dirinya takut kehilangan kekuasaan, Kang Yoto sapaan akrabnya tidak memungkiri hal itu. Akan tetapi, kekuasaan itu untuk mencintai rakyat, bukan untuk keluarganya. “Iya, saya menginginkan itu (kekuasaan). Tetapi, kekuasaan untuk mencintai rakyat Bojonegoro. Bukan untuk keluarga ataupun dinasti politik,” tegasnya. Kang Yoto menampik anggapan politik dinasti yang muncul ditengah masyarakat pasca pencalonan istrinya. Menurut dia, politik dinasti ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk salah satunya di Amerika Serikat yang dianggap sebagai *champion* demokrasi. “Dinasti politik itu cocok jika itu otoriter di alam demokrasi. Dinasti akan menjadi jelek jika

⁶⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua?page=all> akses pada 08 Desember 2019

menjadi alat untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nepotis ini bisa mengajak siapapun, bukan hanya keluarga,” jelasnya.⁶⁶.

Sedikit berbeda dengan pernyataan oleh Sunyoto yang cenderung netral, pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dugaan tersebut dibantah keras oleh Ferdy selaku tim sukses pihak Mahfudhoh – Koeswiyanto yang di wawancarai oleh peneliti, ia menyatakan bahwa :

“Tujuan Kang Nyoto agar Bojonegoro terdepan, tidak miskin, makanya perlu memperjuangkan dana abadi migas. Kang Nyoto sudah menanamkan dana abadi migas yang harus di perjuangkan, khususnya utk pendidikan. Menyaratakan perekonomian. Karena bojonegoro masyarakatnya kurang berpikir panjang, jika sakit, mereka jaruh miskin. Bagaimana memperjuangkan hal tersebut, maka perlu diperjuangkan dengan partai2nya. Harus ada trah dari kang Nyoto yang berjuang lagi utk hal tersbut. Dinasti ini memperjuangkan agar Bojonegoro tidak miskin lagi. Sebab sebelum ini Kabupaten Bojonegoro termasuk kategori Kabupaten miskin, sebelum kemudian dipimpin oleh Sunyoto kemudian banyak kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh Kang Nyoto. Jadi ini bukan hanya sekedar mengenai dinasti politik atau bagaimana, toh pada saat pencalonan semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang benar dan sewajarnya.”

Sementara pernyataan dari Bapak Herman selaku warga masyarakat menyatakan hal sebagai berikut dalam pandangannya :

“Saya itu ndak masalah siapapun yang mau jadi, yang penting buat saya itu kerjanya yang bener. Jangan nyusahin rakyat, ya mestinya menjadi bagaimana pelayanan itu seperti apa dari pemerintah kepada rakyat. Tapi kalo pak Nyoto ini saya kok kurang setuju kalo Bu Nyoto yang kemudian nyalon bupati menggantikan Pak Nyoto, kayak udah keliatan toto-totoannya. Pengennya ya tetep terus kekuasaannya, langgeng terus, padahal dia udah dua periode. Lagian kalo liat Bu Nyoto itu kayaknya orangnya setengah hati, tapi ya gimana lagi mesti nuruti suami. Mungkin ya, itu pandangan saya sekilas. Biasanya orangnya ndak

⁶⁶ <https://faktualnews.co/2018/02/03/istri-bupati-maju-pilkada-bojonegoro-kang-yoto-bukan-politik-dinasti/62916/> akses pada 08 Desember 2019

ribet2 kok, kayak ndak terlalu ambisi gitu. Paling beritanya sekedar ngurusi PKK atau yang lainnya. Ndak pernah yang gimana-gimana. Lha ini kok mau nyalon Pilbub.”

Dari dua pernyataan ini menunjukkan bahwa salah satu indikator dari kekalahan Mahfudhoh dalam Pilbub kemarin adalah karena adanya stigma yang berkembang dalam masyarakat yang bukan mengenai korupsi saja, namun karena kurang kuatnya figur Mahfudhoh sebagai seorang pemimpin untuk dipercaya oleh masyarakat Bojonegoro.

2. Ormas agama pendukung

Aspek lainnya adalah berkaitan dengan institusi lainnya, yakni organisasi keagamaan sekaligus sebagai *supporting grup* dari partai-partai di depannya. Seperti yang diketahui, Machfudhoh – Koeswiyanto diusung oleh PAN, dimana di belakang PAN terdapat organisasi agama Muhammadiyah. Sedangkan Anna Muawanah adalah memiliki afiliasi yang sangat dengan organisasi PKB yang di belakangnya adalah NU.

Terseretnya agama dalam politik bukanlah hal yang aneh, karena secara riil pemeluk agama, khususnya pemeluk Islam, di Bojonegoro merupakan pemeluk agama yang umumnya terkategorikan Tradisional dengan tingkat kepanatikan terhadap agama yang tinggi. Dari segi kuantitas, sebagai contoh, jumlah pemeluk agama Islam di Bojonegoro merupakan mayoritas, dibanding dengan agama lain seperti Kristen kira-kira hanya 5%, Katolik sekitar 4% dan Hindu dan Budha merupakan minoritas ketiga dan keempat. Memahami tingginya korelasi agama dan partai politik, Komaruddin Hidayat dan M. Yudhi Haryono (2004), menyebutkan bahwa

fenomena partai dan politik agama bisa dijelaskan dengan tiga cara: Pertama, agama adalah politik, atau lebih tepatnya produk politik. Berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa kelahiran agama (terutama agama Ibrahimian) adalah kritik perlawanan, pemberontakan, dan pembebasan dari hegemoni dan sistem politik rezim penguasa. Agama menjadi kumpulan daya kohesif yang mengikat umat untuk melakukan perlawanan.

Kedua, agama adalah struktur penyelamat yang menghasilkan agen penyelamatan. Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dan keselamatan sendiri, keluarga dan keselamatan alam semesta. Karenanya agama juga telah menimbulkan khayalan yang paling luas dan digunakan untuk membenarkan kekejaman pada orang lain, membangkitkan kebahagiaan, dan menjalari rasa takut yang luar biasa, sehingga gagasan penyelamatan demikian sentral dalam setiap agama.

Ketiga, agama adalah alat analisis sekaligus jawaban persoalan dunia. Ia adalah sumber pembaharu-pembaharu yang kreatif. Karena paradigma inilah, kita bisa melihat jejak rekam para nabi yang ditempatkan sebagai tempat bertanya sekaligus tempat menjelaskan problem umat. Walaupun demikian, dalam kalangan Islam sendiri tidak homogen. Banyak aliran pemikiran yang berkembang, dan pada akhirnya menjadi mainstream baru dalam mazhab pemikiran Islam. Perbedaan pemikiran ini tidak hanya dalam hal kehidupan sosial, namun juga dilatar belakangi persoalan politik.

Berkembangnya perbedaan pandangan politik di dalam Islam bersumber pada perbedaan pemikiran tentang relasi Islam dan Negara.

Saat ini yang berkembang di Indonesia adalah pemikiran Islam Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama) dimana banyak sekali mewarnai dalam setiap kehidupan politik yang dianut oleh warga negara Indonesia, tak berbeda pula dalam kegiatan politik di Bojonegoro, sangat kuat dipengaruhi tarik menarik kekuatan dari Muhammadiyah dan NU.

Dalam fenomena kekalahan paslon Machfudhoh – Koeswiyanto ini, mereka menggunakan kendaraan partai PAN dan Nasdem. PAN memiliki latar belakang kemuhammadiyah yang sangat kental. Ini juga yang menjadi latar belakang dari suaminya yakni Kang Nyoto yang dulu memenangkan Pilkada dengan menggunakan PAN. Dulu pada saat Kang Nyoto menjabat, figurnya sangat kuat, dan mendapatkan dukungan 100% suara bulat dari kalangan Muhammadiyah. Namun justru kali ini ketika istrinya yang maju menjadi calon Bupati justru suara Muhammadiyah terpecah., hal ini dikarenakan pola pikir beberapa petinggi Muhammadiyah yang cukup konservatif dengan keadaan pemimpin perempuan sehingga menimbulkan perpecahan suara. Sebagian dari mereka bersikap biasa aja apabila dipimpin oleh perempuan, namun sebagian lainnya menyatakan tidak setuju.

Sementara disisi lainnya Anna Muawanah yang memiliki dukungan kuat dari PKB dan NU, ia mendapatkan satu suara bulat dari setiap kader PKB dan NU mulai dari tingkat ranting, cabang, hingga atas. Hal ini

dikarenakan PKB memiliki pandangan yang lebih demokrat terkait dengan pemimpin perempuan, sehingga mereka tidak kesulitan menyetujui untuk memberikan dukungan pada Anna Muawanah sebagai bacapub. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Ferdy sebagai tim sukses Machfudhoh – Koeswiyanto yang menyatakan sebagai berikut :

“Masalah kekalahan, diluar konteks money politics, karena ini adalah perang organisasi keagamaan, Anna – Budi di dukung penuh oleh NU, maka sistemnya disini mereka itu satu komando, kalo di menangkan di atas, di cabang, ranting hingga bawah itu satu komando. Berbeda dengan sistem di Muhammadiyah. Meskipun disetujui oleh PAN dan Nasdem, namun Ini yang dicalonkan adalah perempuan, yakni Mahfudhoh, sementara Muhammadiyah inginnya yang dicalonkan adalah laki-laki. Maka disini, ada perpecahan suara karena figur yang dicalonkan adalah seorang perempuan.”

Maka dari wawancara tersebut memang menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa ada perpecahan suara antara pihak Muhammadiyah dikarenakan perbedaan pemikiran mengenai pemimpin perempuan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan penelitian diatas, maka kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab kekalahan Machfudhoh dalam Pilkada Bupati Bojonegoro terdiri dari penyebab internal dan penyebab eksternal. Berikut akan dibahas lebih mendalam penyebab internal terdiri dari, pertama kurang kuatnya figur Machfudhoh sebagai seorang pemimpin. Machfudhoh dinilai sebagai istri Bupati Sunyoto sebelumnya Mahfudhoh dulunya seolah-olah “tenggelam” dengan dominasi ketokohan Sunyoto suaminya. Hal inipun diperkuat bahwa Mahfudhoh sebenarnya sejak awal tidak punya keinginan masuk dalam dunia politik. Karena itulah PAN kemudian mengusung Kuswiyanto sebagai kandidat dalam Pilkada Bojonegoro. Namun karena dua kali calon wakilnya mundur, maka nama Mahfudhoh kemudian muncul. Kedua, faktor partai pendukung, basis kekuatan pengaruh partai terhadap konstituen pemilihnya di Bojonegoro tetap lebih kuat PKB dan PDIP dibandingkan gabungan partai pendukung Mahfudhoh yakni Nasdem, PAN dan Hanura. Ketiga, faktor lemahnya modal ekonomi, Lebih lanjut, dari perbedaan antara modal ekonomi milik Mahfudhoh dengan modal ekonomi milik pesaingnya Anna Muawanah menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, yakni harta

kekayaan bacabup Anna Mu'awanah yang dilaporkan sebesar Rp 58.396.570.453 sementara urutan kedua daftar harta kekayaan terbesar adalah Bacabup Mahfudhoh sebesar Rp.13.671.742.852 terdapat selisih senilai Rp. 44.724.828, 878 rupiah, sedangkan dana yang digunakan oleh Machfudhoh dalam kampanyenya senilai 12.897.098,009 rupiah, dia juga menerima beberapa dana kampanye yang disumbangkan oleh beberapa orang senilai Rp. 209.000.000,-. Sementara Bacabup Anna Muawanah dan dalam kegiatan kampanyenya menghabiskan dana senilai 35.689.098.890, dan ia menerima sumbangan dari beberapa orang senilai 189.340.800 juta.

Sementara faktor internal antara lain, dikarenakan pertama stigma masyarakat yang buruk mengenai dinasti politik itu sendiri dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Sunyoto tersebut dimaknai masyarakat konstituen Bojonegoro sebagai upaya-upaya untuk melanggengkan peranan dinasti politik Sunyoto sebelumnya yang menjabat sebagai Bupati 2 periode di Bojonegoro, sehingga kemudian mengajukan istrinya untuk maju menggantikannya. Selain itu didukung dengan kurang kuatnya figur Mahfudhoh sebagai seorang pemimpin untuk dipercaya oleh masyarakat Bojonegoro. Penyebab kedua adalah faktor ormas pendukung agama, dimana pecahnya suara Muhammadiyah sebagai basis pendukung Machfudhoh dikarenakan sebagian warga Muhammadiyah memiliki pola pikir yang konservatif dan tidak menghendaki adanya pemimpin perempuan.

5.2 Saran

Adapun penulis memberikan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Membaca dan memahami kondisi psikologis konstituen pemilu adalah sesuatu yang sangat penting. Ini berkaitan dengan setiap strategi ke depan dalam pemilihan umum lebih lanjut. Misalnya pemilihan partai politik dan afiliasi-afiliasi organisasi lainnya.
2. Dari sudut pandang perilaku politik pemilih di Indonesia, faktor ketokohan dan figur adalah sesuatu yang sangat penting. Memahami kebiasaan masyarakat, pola pikir masyarakat, dan background keagamaan adalah hal yang perlu dilakukan untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan secara politis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo & Mohammad Agus Yusoff. 2010. Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia : Local Strongmen dan Roving Bandits. *Jurnal Debat: Malaysian Journal of History, politics & Strategic Studies* Volume 37 th 2010, p 86- 104.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 157-158
- Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70
- Danang, Sunyoto. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Buku Seru. http://repository.upi.edu/17628/4/S_MBS_1001311_Bibliography
- Elly M. Setiadi dkk, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 93
- Ciaran Cronin, Bourdieu and Foucault on Power and Madernity. *Philosophy Social Criticism*, 1999. Vol.22:55-85.
- Haryanto, Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakar di Sulawesi Selatan). (Yogyakarta Polgom, 2014). h.17
- Imaduddin Abdullah, *Political Economy of Accountability in A Resource-Rich Region: A Case Study of Bojonegoro*, (S2 Department of Political Science Lund University: 2014)
- Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 157
- M. Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakrta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 65.
- Mietzner, Marcus. 2009. Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System. *Journal of Contemporary Asia*
- Noeng Muhadjir, *Motode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996), 94
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 71
- Rivai, Veithzal 2007, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 1
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 231
- Synder, dkk. 2009. *Political Dynasties*. Los Angeles: The Review of Economic Studies (2009), Edisi: 76, hal. 115–142.
- Varma, SP. 2007. *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Press.
- Yukl, Gary. (2005). *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks.

SUMBER LAINNYA :

Dalam Was-Was Banjir di Tengah Acara Pelantikan Bupati Baru, Tempo, 11 Maret 2008, diakses melalui <http://nasional.tempo.co/read/news/2008/03/11/058119021/was-was-banjir-di-tengah-acara-pelantikan-bupatibaru> akses pada 22 Oktober 2018

Dalam Eks Bupati Bojonegoro H.M Santoso Total Dihukum 10 Tahun Penjara, Lensa Indonesia, 22 oktober 2018, diakses melalui <http://www.lensaIndonesia.com/2014/01/30/eks-bupati-bojonegoro-hm-santoso-total-dihukum-10-tahun-penjara.html> akses pada 22 Oktober 2018

<https://www.lintasbojonegoro.com/kang-yoto-akui-kekalahan-mk-di-pilkada-2018/> akses pada 22 Oktober 2018

<http://netpitu.com/baca/27/06/2018/hanya-cabup-mafudoh-suyoto-yang-kalah-di-tps-sendiri/> akses pada 22 Oktober 2018

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A